



UNIVERSITAS INDONESIA

**POLA KERUANGAN PERMUKIMAN KUMUH
DI KOTA DEPOK**

SKRIPSI

**WAHYUNI
0806328833**

**FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PROGRAM STUDI GEOGRAFI
DEPOK
JUNI 2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

**POLA KERUANGAN PERMUKIMAN KUMUH
DI KOTA DEPOK**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana sains

WAHYUNI

0806328833

**FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PROGRAM STUDI GEOGRAFI
DEPOK
JUNI 2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Wahyuni

NPM : 0806328833

Tanda Tangan :



Tanggal : 27 Juni 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : Wahyuni
NPM : 0806328833
Program Studi : Geografi
Judul Skripsi : Pola Keruangan Permukiman Kumuh di Kota Depok

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Sains pada Program Studi Geografi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Dra. Maria Hedwig Dewi Susilowati M.S. (.....)

Pembimbing : Dr. Djoko Harmantyo, M.S. (.....)

Pembimbing : Dra. Ratna Saraswati, M.S. (.....)

Penguji : Dra. Widyawati MSP (.....)

Penguji : Drs. F.TH.R. Sitanala M.S. (.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 27 Juni 2012

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sains program studi Geografi pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih kepada:

- (1) Dosen pembimbing Dr. Djoko Harmantyo, M.S. dan Dra. Ratna Saraswati, M.S. atas bimbingannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya;
- (2) Dosen penguji Dra. Maria Hedwig Dewi Susilowati M.S., Dra. Widyawati MSP, dan Drs. F.TH.R. Sitanala M.S. yang telah memberikan pengarahan-pengarahan yang membuat skripsi ini menjadi lebih baik;
- (3) Drs. Supriatna M.T. selaku pembimbing akademik;
- (4) Dosen-dosen Program Studi Geografi, Universitas Indonesia yang telah membagikan ilmunya kepada saya selama empat tahun ini;
- (5) Dinas Tata Ruang dan Bappeda Kota Depok yang telah bersedia memberikan data-data yang saya butuhkan dalam penyelesaian skripsi ini;
- (6) Petugas kelurahan, ketua RW, ketua RT yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan semua informasi yang saya butuhkan dalam penyelesaian skripsi ini;
- (7) Bapak Sarief wakil ketua RT 06/019 Kampung Lio yang telah dengan sabar menemani saya menemui ketua-ketua RW yang ada di Kelurahan Depok;
- (8) Para penduduk wilayah kajian yang telah bersedia meluangkan sedikit waktunya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan saya sebagai responden;

- (9) Amakku tercinta, yang selalu menjadi cahaya penerang bagiku dalam perjalanan ini. Kau adalah wanita terhebat bagiku di dunia ini, terima kasih atas semua kasih sayang, didikan, nasihat, doa, kesabaran, dan pengorbanan yang telah kau berikan untukku. Semoga Allah memberikan kesehatan, mengampuni dosa-dosamu, dan menyayangimu di dunia dan akhirat. Apakku tercinta, terima kasih atas semua dukunganmu selama ini. Ciak ii, Adikku tercinta, terima kasih atas semua dukungan, semangat, dan pengertian yang selalu kau berikan padaku. Kakak-kakakku, Ni Juli, Da Pul, Da us, Da wan, Da Pal, dan Kak Sum yang telah memberikan banyak dukungan dan bantuan. Keponakan-keponakanku tercinta, Cha-cha, Haikal, dan Kiran yang telah menjadi penambah semangat bagiku dalam menyelesaikan skripsi ini. Tek Yus, yang telah memberikan dukungan padaku selama masa perkuliahan ini. Maktuo mani, Tek Yus Padang, dan Paktuo Sarin.
- (10) Ima, Avrie, dan Lilis para pociners yang selalu menjadi sahabat bagiku. Kalian adalah bagian terbaik yang pernah kumiliki dalam empat tahun perjalanan ini. Semoga sampai kapanpun kita akan tetap menjadi sahabat. Teman-teman Geografi angkatan 2008: Gita, Ririz, Salira, Bela, Wika, Ranie, April, Risha, Aul, Karin, Dita, Yoga, dan yang lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Kalian telah memberikan banyak bantuan, pengetahuan, dan pengalaman selama empat tahun ini.

Akhir kata, saya berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan dari semua pihak yang telah membantu sehingga laporan skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Depok, Juni 2012

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wahyuni
NPM : 0806328833
Program Studi : Geografi
Fakultas : Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Jenis karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Pola Keruangan Permukiman Kumuh di Kota Depok

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola, dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Depok

Pada tanggal 27 Juni 2012

Yang menyatakan



(Wahyuni)

ABSTRAK

Nama : Wahyuni
Program Studi : Geografi
Judul : Pola Keruangan Permukiman Kumuh di Kota Depok

Kota Depok menghadapi permasalahan terkait penyediaan lahan permukiman bagi penduduknya yang mengakibatkan terbentuk dan berkembangnya permukiman kumuh. Skripsi ini membahas tentang pola keruangan permukiman kumuh Kota Depok berdasarkan tingkat kekumuhannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan keruangan dengan tema analisis pola keruangan dan unit analisis berupa tingkat kekumuhan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kekumuhan permukiman kumuh di Kota Depok erat hubungannya dengan jarak terhadap badan air, rel kereta api dan lokasi aktifitas ekonomi; serta tingkat pendidikan, pekerjaan, dan status kependudukan mempengaruhi tingkat kekumuhan dari aspek sosial ekonomi.

Kata Kunci:

Pola keruangan, permukiman kumuh, tingkat kekumuhan.

ABSTRACT

Name : Wahyuni
Study Program : Geography
Title : Spatial Pattern of Slum areas in Depok City

Depok City experiencing problems related to housing land supply for its residents which resulted in forming and growing of slum areas. This Undergraduate thesis discusses about the spatial pattern of Depok's slum areas based on its slums level. In this research, spatial approach, especially spatial pattern analysis is used to analyse the spatial pattern of slum area in Depok City. The result of this research indicate that level of slum areas in Depok City closely related to the distance from the water bodies, the distance from the railway, and the distance from the economic activities; as well as the educational levels, employment, and residential status influence the slum level of Depok's slum areas from the socio-economic aspect.

Key words:

Spatial pattern, slum area, slums level.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Masalah Penelitian	2
1.3 Tujuan Penelitian	2
1.4 Batasan Penelitian	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1 Pendekatan Keruangan (<i>Spatial Approach</i>)	5
2.1.1 Analisis Pola Keruangan (<i>Spatial Pattern Analysis</i>)	6
2.2 Urbanisasi	6
2.3 Migrasi	6
2.3.1 Faktor-faktor yang Memengaruhi Migrasi	7
2.3.2 Migrasi Sebagai Penyebab Terbentuknya Permukiman Kumuh	8
2.4 Permukiman	8
2.5 Prioritas Pemenuhan Kebutuhan Akan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah	9

2.6	Permukiman di Wilayah Perkotaan	9
2.7	Permukiman Kumuh	10
2.7.1	Pengertian Kumuh	10
2.7.2	Pengertian Permukiman Kumuh	11
2.7.3	Ciri-ciri Permukiman Kumuh	12
2.7.4	Faktor Penyebab Terbentuknya Permukiman Kumuh	14
2.7.5	Proses Terbentuknya Permukiman Kumuh	15
2.7.6	Morfologi Permukiman Kumuh	16
2.7.7	Tipologi Permukiman Kumuh	16
2.8	Indikator dan Tingkat Kekumuhan	17
2.9	Identifikasi Permukiman Kumuh Menggunakan Citra	19
2.10	Penelitian-penelitian Terdahulu	21
BAB III METODOLOGI PENELITIAN		22
3.1	Alur Pikir Penelitian	22
3.2	Variabel Penelitian	23
3.3	Pengumpulan Data	23
3.4	Pengolahan Data	25
3.4.1	Pengolahan Data Sekunder	25
3.4.2	Identifikasi Permukiman Kumuh	25
3.5	Analisis Data	28
BAB IV GAMBARAN UMUM KOTA DEPOK		30
4.1	Letak Kota Depok	30
4.2	Pemerintahan	31
4.3	Kondisi Iklim dan Fisik Wilayah Kota Depok	31
4.4	Penggunaan Tanah Kota Depok	32
4.5	Jaringan Jalan Kota Depok	33
4.6	Permukiman di Kota Depok	33
4.7	Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Depok 2010-2030	35

4.8	Demografi Kota Depok	37
4.9	Sosial Ekonomi Kota Depok	38
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN		41
5.1	Permukiman Kumuh di Kota Depok	41
5.1.1	Permukiman Kumuh Hasil Identifikasi Citra Quickbird, 2010	41
5.1.2	Permukiman Kumuh Hasil Verifikasi Lapangan	42
5.2	Karakteristik Lokasi Permukiman Kumuh di Kota Depok	44
5.2.1	Permukiman Kumuh dengan Jarak dari Badan Air	44
5.2.2	Permukiman Kumuh dengan Jarak dari Rel Kereta Api	46
5.2.3	Permukiman Kumuh dengan Jarak dari Pusat Ekonomi	47
5.2.4	Tipologi Permukiman Kumuh di Kota Depok	48
5.3	Karakteristik Permukiman Kumuh di Kota Depok	50
5.3.1	Jarak antar Bangunan	50
5.3.2	Kondisi Jalan Lingkungan	51
5.3.3	Kondisi Bangunan	52
5.3.4	Kondisi Sanitasi	53
5.3.5	Kondisi Persampahan	54
5.3.6	Sumber Air Bersih	55
5.3.7	Kondisi Saluran Limbah	56
5.4	Karakteristik Sosial Ekonomi Permukiman Kumuh di Kota Depok ..	56
5.4.3	Status Kependudukan	56
5.4.1	Pendidikan	57
5.4.2	Pekerjaan	58
5.5	Tingkat Kekumuhan Permukiman Kumuh di Kota Depok	58
5.6	Pola Keruangan Permukiman Kumuh di Kota Depok Berdasarkan Tingkat Kekumuhannya	60
5.6.1	Permukiman Kumuh Berat	60
5.6.2	Permukiman Kumuh Sedang	64

5.6.3 Permukiman Kumuh Ringan	67
BAB VI KESIMPULAN	69
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN	73



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.2	Alur Pikir Penelitian	22
Gambar 4.1	Peta Administrasi Kota Depok	30
Gambar 4.2	Presentase luas Penggunaan Tanah Kota Depok Tahun 2010	33
Gambar 4.3	Persentase Luas Peruntukan Ruang Kota Depok, 2010-2030	37
Gambar 4.4	Persentase Penduduk Kota Depok Menurut Lapangan Usaha	39
Gambar 4.5	Persentase Ijazah Terakhir Penduduk Usia 10 tahun ke atas	40
Gambar 5.1	Grafik Presentase Luasan Permukiman Kumuh Masing-masing Kelurahan di Kota Depok	44
Gambar 5.2	Grafik Persentase Perbandingan Jumlah Berdasarkan Tipologinya	49
Gambar 5.3	Jalan lingkungan permukiman Kumuh	52
Gambar 5.4	Kondisi Bangunan Permukiman Kumuh	53
Gambar 5.5	Grafik Jumlah permukiman Kumuh Berdasarkan Tingkat kekumuhannya	59
Gambar 5.6	Karakteristik Lokasi Permukiman Kumuh Berat	60
Gambar 5.7	Karakteristik Lokasi Permukiman Kumuh Berat	65
Gambar 5.8	Karakteristik Lokasi Permukiman Kumuh Berat	67

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Indikator Kekumuhan Menurut UN-HABITAT	18
Tabel 2.2	Indikator Interpretasi Permukiman Kumuh Menggunakan Foto Udara	19
Tabel 2.3	Indikator Verifikasi Permukiman Kumuh/uji lapang	20
Tabel 3.1	Indikator Interpretasi Permukiman Kumuh Menggunakan Foto Udara	26
Tabel 3.2	Indikator Verifikasi Permukiman Kumuh/uji lapang	27
Tabel 3.3	Penilaian Tingkat Kekumuhan Total	28
Tabel 3.4	Pengkelasan Jarak dalam Analisis	29
Tabel 4.1	Nama Kecamatan dan Kelurahan di Kota Depok	31
Tabel 4.2	Luasan dan Presentase Penggunaan Tanah di Kota Depok	32
Tabel 4.3	Luas Permukiman di Kota Depok Berdasarkan Tata Letaknya	34
Tabel 4.4	Luasan Peruntukan Ruang Kota Depok Tahun 2010 – 2030	36
Tabel 4.5	Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, dan Kepadatan Penduduk Kota Depok Menurut Kecamatan, 2010	38
Tabel 4.6	Penduduk Usia 15 Tahun ke atas Kota Depok Menurut Status Pekerjaan, 2010	39
Tabel 5.1	Lokasi Permukiman Kumuh Hasil Identifikasi Citra Quickbird (2010) di Kota Depok	42
Tabel 5.2	Luas Permukiman Kumuh di Kota Depok	43
Tabel 5.3	Jumlah dan Luas Permukiman Kumuh Berdasarkan Jarak dari Badan Air	45
Tabel 5.4	Jumlah dan Luas Permukiman Kumuh Berdasarkan Jarak dari Rel Kereta Api	46
Tabel 5.5	Jumlah dan Luas Permukiman Kumuh Berdasarkan Jarak dari Pusat Ekonomi	48
Tabel 5.6	Luas dan Presentase Permukiman Kumuh Menurut Tipologinya	49

Tabel 5.7	Luas dan Presentase Permukiman Kumuh di Kota Depok Berdasarkan Jarak antar Bangunan	50
Tabel 5.8	Luas dan Presentase Permukiman Kumuh di Kota Depok Berdasarkan Kondisi Jalan Lingkungan	51
Tabel 5.9	Luas dan Presentase Permukiman Kumuh di Kota Depok Berdasarkan Kondisi Bangunan	52
Tabel 5.10	Luas dan Presentase Permukiman Kumuh Berdasarkan Kondisi Sanitasi	54
Tabel 5.11	Luas dan Presentase Permukiman Kumuh Berdasarkan Kondisi Persampahan	54
Tabel 5.12	Luas dan Presentase Permukiman Kumuh Berdasarkan Sumber Air Bersih yang digunakan	55
Tabel 5.13	Luas dan Presentase Permukiman Kumuh Berdasarkan Kondisi Saluran Limbah	56
Tabel 5.14	Jumlah dan Presentase Penduduk Permukiman Kumuh Menurut Status Kependudukannya	57
Tabel 5.15	Jumlah dan Presentase Penduduk Permukiman Kumuh Menurut Pendidikan	57
Tabel 5.16	Jumlah dan Presentase Penduduk Permukiman Kumuh Menurut Pekerjaan	58
Tabel 5.17	Luasan Permukiman Kumuh Berdasarkan Tingkat Kekumuhannya	59
Tabel 5.18	Kondisi Sosial Ekonomi Pernduduk Permukiman Kumuh Berat	62
Tabel 5.19	Kondisi Sosial Ekonomi Pernduduk Permukiman Kumuh Sedang ..	66
Tabel 5.20	Kondisi Sosial Ekonomi Pernduduk Permukiman Kumuh Ringan ..	68

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 FOTO	74
LAMPIRAN 2 PETA	76
Lampiran Peta 2	Penggunaan Tanah Kota Depok, 2010	77
Lampiran Peta 3	Jaringan Jalan Kota Depok, 2010	78
Lampiran Peta 4	Permukiman Kota Depok, 2010	79
Lampiran Peta 5	RTRW Kota Depok 2010-2030	80
Lampiran Peta 6	Lokasi Permukiman Kumuh Hasil Identifikasi Citra	81
Lampiran Peta 7	Permukiman Kumuh Hasil Verifikasi Lapang	82
Lampiran Peta 8	Permukiman Kumuh Berat	83
Lampiran Peta 9	Permukiman Kumuh Sedang	84
Lampiran Peta 10	Permukiman Kumuh Ringan	85
Lampiran Peta 11	Kode Lokasi Peta Kerja	86
LAMPIRAN 3 TABEL	87
Lampiran Tabel 1	Nilai Indikator Penilaian Tingkat Kekumuhan	87
Lampiran Tabel 2	Karakteristik Lokasi Permukiman Kumuh Kota Depok	90

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kota dengan segala isinya memiliki daya tarik tersendiri bagi para migran untuk berbondong-bondong datang dan bermukim di dalamnya. Kegiatan bermigrasi menjadi pilihan karena daerah asalnya tidak mampu memberikan pilihan yang lebih baik, sementara itu kota dianggap mampu memberikan berbagai pilihan dan pengharapan yang lebih baik bagi kehidupan mereka. Pengharapan akan kehidupan yang lebih baik tersebut, terkadang membuat para migran menjadi nekat datang ke kota tanpa disertai dengan modal yang cukup, baik modal dalam bentuk uang untuk memenuhi kebutuhan kota yang serba mahal maupun modal dalam bentuk keterampilan dan pendidikan untuk dapat memperoleh pekerjaan. Sebagai akibatnya daerah-daerah permukiman kumuh dan kampung-kampung di tengah kota menjadi pilihan bagi mereka sebagai tempat bermukim guna memperkecil biaya hidup.

Kota Depok merupakan salah satu kota yang terletak di pinggiran Kota Jakarta. Letaknya yang berada di pinggiran Kota Jakarta tersebut membuat Kota Depok dari waktu ke waktu mengalami perkembangan yang semakin pesat sebagai sebuah kota. Sebagai daerah pinggiran Kota Jakarta yang terus mengalami perkembangan, Kota Depok menjadi tujuan alternatif bagi para pendatang yang datang dari berbagai daerah di Indonesia maupun bagi pendatang yang datang dari Kota Jakarta, baik sebagai tempat untuk mencari nafkah dan bermukim ataupun hanya sekedar sebagai tempat untuk bermukim. Sebagai akibatnya dari waktu ke waktu jumlah penduduk Kota Depok yang semula sedikit dengan tingkat kepadatan rendah, lama kelamaan menjadi semakin banyak dengan dengan laju pertumbuhan penduduk yang juga semakin tinggi setiap tahunnya.

Dalam perkembangannya, sama seperti kota-kota pada umumnya di negara berkembang Kota Depok juga menghadapi masalah ketersediaan lahan. Kota Depok

yang secara administratif memiliki luasan tetap dihadapkan pada permintaan yang tinggi akan lahan, terutama untuk keperluan permukiman. Pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak bagi penduduknya menjadi satu hal yang cukup sulit, terutama disebabkan oleh banyaknya pendatang yang datang dengan bekal pendidikan dan keterampilan rendah sehingga kebanyakan dari mereka tidak dapat tertampung di sektor-sektor formal yang diyakini mampu memberikan penghasilan tinggi dan terpaksa hidup dari kegiatan-kegiatan di sektor informal dengan penghasilan rendah. Sebagai konsekuensinya, para penduduk pendatang tersebut tidak memiliki kemampuan untuk memiliki lahan yang memadai dan tempat tinggal yang layak sebagai tempat tinggal sehingga pada akhirnya kebanyakan dari mereka memilih menyewa rumah di bagian pusat kota yang berjarak relatif dekat dengan tempat mereka bekerja sebagai tempat tinggal yang mengakibatkan terjadinya pemadatan bangunan yang tidak terkendali dan menciptakan lingkungan permukiman yang kumuh (*slum*) atau membuat bangunan sendiri di bagian-bagian kota yang belum dimanfaatkan dan memunculkan permukiman liar (*squatter*) (Yunus, 2006).

Keberadaan permukiman kumuh memberikan dampak yang kurang baik terhadap kondisi lingkungan, serta merusak tatanan ruang kota oleh karena itu perlu dikembangkan penelitian dengan judul “Pola Keruangan Permukiman Kumuh di Kota Depok” untuk mengetahui pola keruangan lokasi permukiman-permukiman kumuh yang ada di Kota Depok.

1.2 Masalah Penelitian

Masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pola keruangan permukiman kumuh di Kota Depok berdasarkan tingkat kekumuhannya?

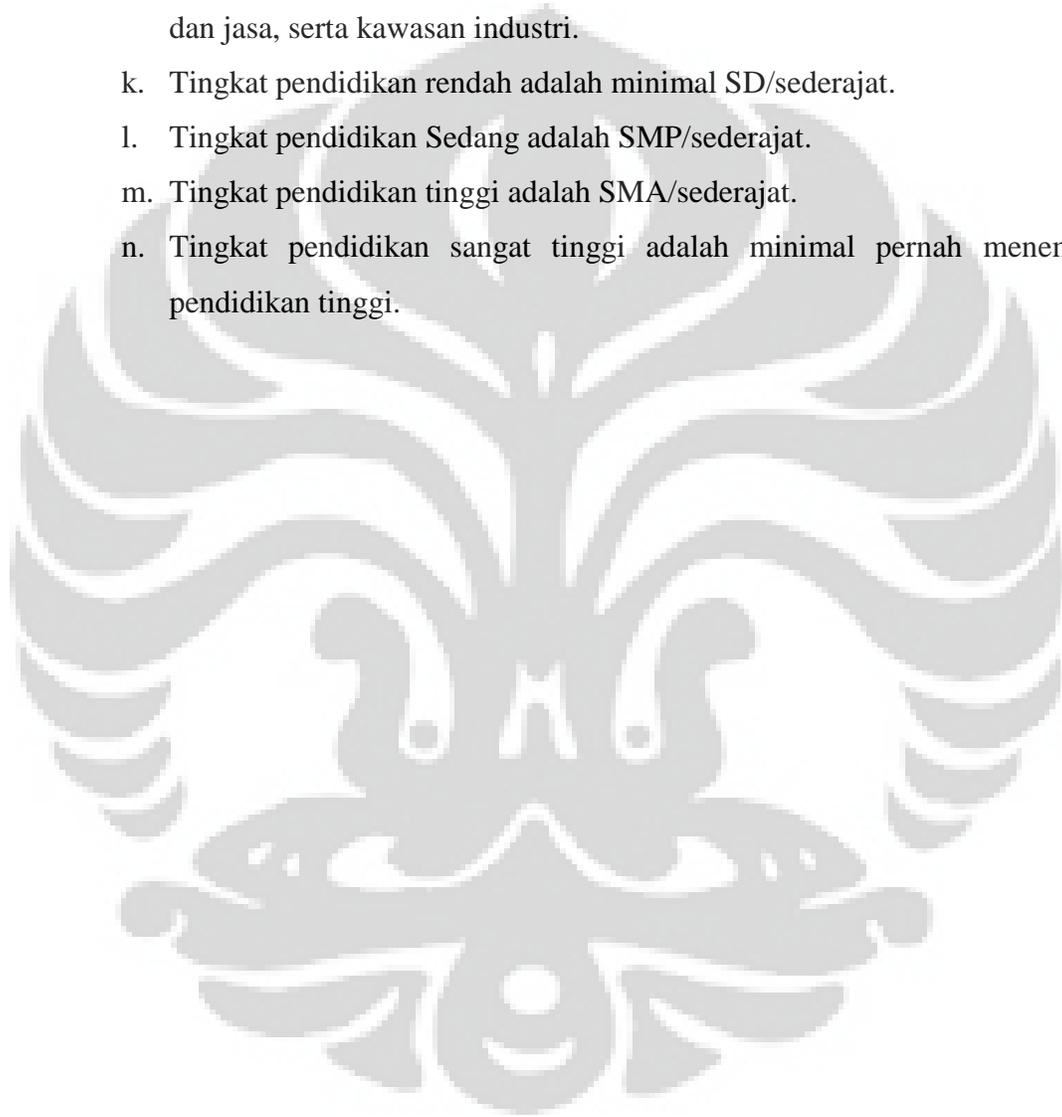
1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan Untuk memperoleh gambaran tentang pola keruangan permukiman kumuh yang ada di Kota Depok berdasarkan tingkat kekumuhannya.

1.4 Batasan Penelitian

- a. Pola Keruangan adalah tingkatan kekumuhannya dilihat dari jarak lokasinya terhadap badan air, rel kereta api, lokasi-lokasi aktivitas ekonomi, serta kondisi sosial ekonomi penduduk dan status tanahnya.
- b. Permukiman adalah bagian dari lingkungan di luar kawasan lindung yang berfungsi sebagai tempat tinggal dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan (Badan Standarisasi Nasional, 2004).
- c. Permukiman kumuh dalam penelitian ini meliputi permukiman kumuh dengan tipologi *slum* dan *squatter*. Permukiman kumuh dengan tipologi *slum* adalah permukiman kumuh yang secara geografis memiliki lokasi yang layak huni, namun tidak memiliki kondisi fisik bangunan yang memadai. Sedangkan permukiman kumuh dengan tipologi *squatter* adalah permukiman kumuh yang dibangun di kawasan-kawasan yang terlarang dan bersifat ilegal atau liar (tidak memiliki izin).
- d. Penduduk pendatang adalah penduduk yang bertempat tinggal di daerah yang berbeda dengan daerah tempat kelahirannya.
- e. Penduduk asli adalah penduduk bertempat tinggal di daerah yang sama dengan daerah tempat kelahirannya.
- f. Badan air adalah kumpulan air yang besarnya antara lain tergantung pada relief permukaan bumi, curah hujan, suhu, dll (Dinas Pekerjaan Umum, n.d). Badan air dalam penelitian ini adalah sungai dan situ.
- g. Tingkat kekumuhan adalah kelas yang menunjukkan tinggi rendahnya kekumuhan yang diperoleh dari hasil penilaian pengamatan lapang (Tabel 3.3) dengan indikator berupa jarak antar bangunan, kondisi aksesibilitas, jenis bangunan, kondisi sanitasi, persampahan, penyediaan air bersih, saluran limbah, dan pekerjaan sebagian besar penduduk.
- h. Jarak dari badan air adalah jarak dari titik terdekat area permukiman kumuh terhadap badan air (sungai dan atau situ).

- i. Jarak dari rel kereta api adalah jarak dari titik terdekat area permukiman kumuh terhadap rel kereta api.
- j. Jarak dari pusat ekonomi adalah jarak dari titik terdekat area permukiman kumuh dari aktivitas-aktivitas ekonomi yang ada di Kota Depok, yaitu berupa CBD, kawasan perdagangan retail dan jasa, kawasan perkantoran dan jasa, serta kawasan industri.
- k. Tingkat pendidikan rendah adalah minimal SD/ sederajat.
- l. Tingkat pendidikan Sedang adalah SMP/ sederajat.
- m. Tingkat pendidikan tinggi adalah SMA/ sederajat.
- n. Tingkat pendidikan sangat tinggi adalah minimal pernah menempuh pendidikan tinggi.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pendekatan Keruangan (*Spatial Approach*)

Menurut Yunus (2010) pendekatan keruangan merupakan satu dari tiga pendekatan utama dalam ilmu geografi, yaitu (1) pendekatan keruangan (*spatial approach*), (2) pendekatan Ekologis (*ecological approach*), dan (3) pendekatan kompleks wilayah (*regional complex approach*). Pendekatan keruangan menurut Yunus dapat didefinisikan sebagai suatu metode yang menggunakan variabel ruang dalam setiap analisisnya untuk memahami gejala tertentu agar mempunyai pengetahuan yang lebih mendalam melalui media ruang.

Ruang dapat diartikan sebagai bagian tertentu dari permukaan bumi yang bisa mengakomodasikan berbagai aktivitas manusia dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhannya (Yunus, 2010). Ruang dapat dibedakan atas ruang absolut dan relatif. Ruang absolut merupakan ruang yang bersifat riil, kasat mata, dan dapat diamati, baik secara langsung maupun tidak langsung di permukaan bumi, seperti: wilayah permukiman, wilayah pertanian, wilayah banjir, dll. Sedangkan ruang relatif merupakan konsep yang diciptakan oleh manusia dan bersifat perseptual, serta tidak kasat mata, seperti: ruang ideologis, ruang ekonomi, ruang budaya, ruang publik, ruang personal, dll.

Yunus menyebutkan bahwa paling tidak terdapat sembilan tema analisis dalam pendekatan keruangan, yaitu: (1) analisis pola keruangan, (2) analisis struktur keruangan, (3) analisis proses keruangan, (4) analisis interaksi keruangan, (5) analisis organisasi/sistem keruangan, (6) analisis asosiasi keruangan, (7) analisis komparasi keruangan, (8) analisis kecenderungan keruangan, serta (9) analisis sinergi keruangan. Menurut Yunus dalam menggunakan pendekatan keruangan dapat mendasarkan analisis pada satu atau lebih tema-tema tersebut.

2.1.1 Analisis Pola Keruangan (*Spatial Pattern Analysis*)

Menurut Yunus (2010), pola keruangan dapat diartikan sebagai kekhasan sebaran keruangan (*special spatial distribution*) gejala geosfera di permukaan bumi. Dalam membahas mengenai pola keruangan menurut Yunus hal yang perlu ditekankan adalah keterkaitan antara posisi individual gejala dengan peletakan/lokasinya dalam ruang. Analisis pola ruang dapat dilakukan dalam tiga tahapan utama, yaitu: mengabstraksi kenampakan yang akan dianalisis menjadi bentuk-bentuk elemen titik, garis, atau area; mengidentifikasi kekhasan dan sebaran dari elemen pembentuk ruang yang akan dianalisis; dan menjawab pertanyaan geografis berupa *what, where, when, why, who, dan how* (Yunus, 2010).

2.2 Urbanisasi

Menurut Munir (2004) urbanisasi dapat didefinisikan sebagai bertambahnya proporsi penduduk yang tinggal di daerah kota karena proses perpindahan penduduk dari desa ke kota sebagai akibat dari perluasan wilayah perkotaan.

Menurut Graeme (1987), urbanisasi yang terjadi Indonesia biasanya terjadi secara berlebihan yang memberikan dampak positif dan negatif (Masjkuri, 2007). Dampak positif dialami oleh daerah yang ditinggalkan, dimana daerah yang ditinggalkan dapat mengalami peningkatan pendapatan, kesehatan, dan kesejahteraan. Sementara itu dampak negatif dialami oleh kota, dimana tingkat pengangguran menjadi semakin tinggi karena kesempatan kerja yang ada pertumbuhannya tidak sesuai dengan pertumbuhan penduduk.

2.3 Migrasi

Menurut Munir (2004), migrasi dapat didefinisikan sebagai perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain melampaui batas politik/negara ataupun batas administratif/batas bagian dalam suatu negara. Munir juga menambahkan bahwa migrasi sering diartikan sebagai perpindahan yang relatif permanen dari suatu daerah ke daerah lain dengan dua dimensi penting, yaitu waktu dan daerah. Dimana

dimensi waktu dan daerah merupakan ukuran yang digunakan untuk menetapkan seseorang yang pindah dari suatu tempat ke tempat lain untuk dapat dianggap sebagai migran.

Yunus (2006) mengatakan bahwa dari waktu ke waktu, sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk perkotaan serta meningkatnya tuntutan kebutuhan kehidupan dalam aspek-aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, dan teknologi telah mengakibatkan meningkatnya kegiatan penduduk perkotaan dan hal tersebut berakibat pada meningkatnya kebutuhan ruang kota yang besar (Warsono, 2006). Oleh karena ketersediaan ruang di dalam kota tetap dan terbatas, maka secara alamiah terjadi pemilihan alternatif dalam memenuhi kebutuhan ruang untuk tempat tinggal dan kedudukan fungsi-fungsi selalu akan mengambil ruang di daerah pinggiran kota.

2.3.1 Faktor-faktor yang Memengaruhi Migrasi

Menurut Munir (2004), pada dasarnya faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan migrasi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu faktor pendorong dan penarik. Lebih lanjut Munir menyebutkan faktor-faktor pendorong terjadinya migrasi seperti:

- a. Menyempitnya lapangan pekerjaan di daerah tempat asal
- b. Adanya tekanan atau diskriminasi politik, agama, atau suku di daerah asal
- c. Tidak cocok lagi dengan adat atau budaya di tempat asal
- d. Karena alasan pekerjaan
- e. dan karna bencana alam atau adanya wabah penyakit di tempat asal

Sementara itu faktor-faktor penarik menurut Munir antara lain:

- a. Adanya kesempatan untuk memperoleh lapangan pekerjaan di tempat yang baru
- b. Kesempatan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik
- c. Kesempatan mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi
- d. Keadaan lingkungan dan keadaan hidup yang menyenangkan, misalnya perumahan, sekolah, atau fasilitas-fasilitas kemasyarakatan lain

- e. Pengaruh dari orang yang diharapkan dapat menjadi tempat berlindung
- f. Adanya pusat-pusat kegiatan, seperti pusat hiburan atau pusat kebudayaan di daerah tujuan.

2.3.2 Migrasi Sebagai penyebab Terbentuknya Permukiman Kumuh

Kebanyakan kota besar di negara-negara berkembang mengalami permasalahan yang sama dalam memenuhi kebutuhan perumahan yang layak bagi penghuninya yang salah satunya disebabkan oleh banyaknya pendatang ke kota dengan bekal pendidikan dan keterampilan yang rendah sehingga kebanyakan dari mereka tidak dapat tertampung di sektor-sektor formal yang diyakini mempunyai tingkat penghasilan lebih tinggi dan mereka terpaksa hidup dari kegiatan di sektor informal dengan penghasilan rendah (Yunus, 2006). Untuk dapat memenuhi kebutuhan akan rumah mereka menyewa di bagian pusat kota yang dekat dengan tempat dimana mereka bekerja sehingga mengakibatkan terjadinya proses pemadatan bangunan yang tidak terkendali dan menciptakan permukiman kumuh (*slums*). sementara itu sebagian lainnya membuat bangunan sendiri dengan bahan-bahan seadanya pada bagian-bagian kota tertentu yang dianggap tidak bertuan dan memunculkan permukiman liar (*squatter settlement*).

2.4 Permukiman

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan rumah yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan. Sedangkan menurut Badan Standarisasi Nasional permukiman adalah bagian dari lingkungan di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

2.5 Prioritas Pemenuhan Kebutuhan akan Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Menurut Turner (1968), dalam memenuhi kebutuhan akan perumahan setiap manusia memiliki pertimbangan yang berkaitan dengan kondisi ekonominya (Rindarjono, 2007). Lebih lanjut Turner menyatakan bahwa bagi penduduk dengan penghasilan rendah, terdapat tiga tingkatan prioritas dalam memenuhi kebutuhan akan perumahan, yaitu:

1. Prioritas utama adalah faktor jarak, dimana keluarga dengan pendapatan rendah cenderung meletakkan prioritas utama lokasi rumah yang berdekatan dengan tempat-tempat yang dapat memberikan mereka kesempatan kerja. Kesempatan kerja ini mereka butuhkan untuk dapat bertahan hidup dan menopang kebutuhan hidup sehari-hari.
2. Prioritas kedua adalah faktor status lahan dan rumah.
3. dan Prioritas ketiga bagi penduduk dengan penghasilan rendah dalam memenuhi kebutuhan akan perumahan adalah bentuk dan kualitas rumah.

Hal tersebut senada dengan pendapat yang dikemukakan oleh Panudju (1999), dimana menurutnya bentuk dan kualitas rumah bagi penduduk dengan penghasilan rendah menjadi prioritas terakhir dalam memenuhi kebutuhan perumahan karena bagi mereka yang terpenting adalah tersedianya rumah sebagai tempat berlindung dan beristirahat dalam rangka mempertahankan hidup.

2.6 Permukiman di Wilayah Perkotaan

Permukiman di wilayah perkotaan dapat dibedakan atas permukiman formal dan permukiman informal (Ishtiyag & Kumar, 2011). permukiman formal merupakan permukiman yang dibangun dan dikembangkan oleh badan pemerintah atau pengembang perumahan dengan perencanaan yang baik. Sedangkan permukiman informal merupakan permukiman yang dibangun secara ilegal baik di tanah milik pemerintah maupun tanah milik sendiri dengan cara sembarangan, tanpa perencanaan, dan tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Permukiman

informal ini menurut Ishtiyag dan Kumar dapat bersifat permanen/non-permanen maupun bersifat sementara di pinggiran-pinggiran sungai, pinggiran rel kereta api, wilayah dataran banjir, daerah rawan, serta di atas lahan pertanian penduduk atau di dalam kawasan hijau kota.

Jha (1986) mengatakan bahwa pertumbuhan permukiman informal kota terutama disebabkan oleh fenomena migrasi penduduk dari desa ke kota (Ishtiyag & Kumar, 2011). Para migran dari desa ini tinggal di pusat-pusat kota dan bekerja di sektor informal sehingga mereka tidak memiliki tabungan yang cukup untuk dapat hidup di lingkungan dan permukiman yang sehat serta terencana. Hal tersebut kemudian memaksa mereka tinggal di wilayah-wilayah yang kumuh.

2.7 Permukiman Kumuh

2.7.1. Pengertian Kumuh

Menurut Clinard (1968), pemahaman tentang kumuh dapat ditinjau dari dua fungsi utama, yaitu sebagai sebab dan sebagai akibat.

1. Sebagai sebab, kumuh merupakan kemunduran atau kerusakan lingkungan hidup yang dapat dilihat dari segi:
 - a. Segi fisik, yaitu gangguan yang ditimbulkan oleh unsur-unsur alam seperti air (pencemaran air) dan udara (pencemaran udara).
 - b. Segi sosial/masyarakat: yaitu gangguan yang ditimbulkan oleh manusia, seperti sampah.
2. Sebagai akibat, kumuh adalah akibat perkembangan dari gejala-gejala seperti:
 - a. Kondisi Perumahan yang buruk, tidak sesuai dengan standar yang berkaitan dengan standar yang berkaitan dengan kebersihan, keamanan, dan kelayakan dari bangunan rumah sebagai tempat tinggal.
 - b. Penduduk yang terlalu padat dan melebihi kapasitas wilayah tempat bermukim sehingga sebagai akibatnya jarak antar rumah sangat berdekatan dan tidak teratur.

- c. Fasilitas yang kurang memadai, seperti fasilitas air bersih, mck, pelayanan listrik, jalan, dan tempat penampungan sampah.
- d. Tingkah laku penghuninya yang cenderung menyimpang dan menjurus pada tindak kriminal.
- e. Budaya kumuh, sikap dan perilaku buruk yang telah menjadi kebiasaan bagi warganya, seperti sikap membuang sampah sembarangan atau menjemur pakaian ditempat-tempat yang tidak bersih.

2.7.2. Pengertian Permukiman Kumuh

Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.

Pada dasarnya terdapat lima tipologi atau watak utama terbentuknya permukiman kumuh, yaitu: desa atau kampung tradisional yang berkembang secara alami dan mengalami pemadatan; kawasan yang belum dibangun oleh pemerintah dan dalam waktu yang lama mengalami pemadatan; permukiman yang dibangun sendiri di tempat-tempat yang pernah dikuasai oleh kaum kolonialis pada awal kemerdekaan; menempati lahan-lahan marginal yang tidak bertuan; serta menduduki dengan motif ekonomi (Silas, 1993).

Sementara itu menurut UN-HABITAT rumah tangga kumuh didefinisikan sebagai sekelompok orang yang hidup satu atap di kota dan tidak memiliki satu atau lebih dari lima kondisi, yaitu: (a) rumah dari bahan permanen di lokasi yang tidak rawan bencana (b) area huni yang layak, dimana tidak lebih dari tiga orang berbagi satu kamar (c) akses ke air bersih yang mencukupi kebutuhan sehari-hari dalam harga yang terjangkau (d) akses ke sanitasi yang layak dan (e) kepemilikan lahan yang aman dan legal sehingga tidak rawan penggusuran.

Selanjutnya menurut UU No. 4 pasal 22 Tahun 1992 tentang perumahan dan permukiman, permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni yang disebabkan karena antara lain berada pada lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya atau tata ruang, kepadatan bangunan yang sangat tinggi dalam luasan wilayah yang terbatas, rawan penyakit sosial dan lingkungan, kualitas umum bangunan rendah, tidak mendapat pelayanan yang memadai, serta membahayakan kelangsungan hidup penghuninya.

2.7.3. Ciri-ciri Permukiman Kumuh

Clinard (1968) menyebutkan bahwa permukiman kumuh memiliki ciri-ciri:

- a. Padat bangunannya atau padat orangnya dalam satu bangunan atau keduanya.
- b. Miskin fasilitas dan pelayanan sosial; bangunan rumah yang tidak baik sanitasinya, tidak memiliki mck, dan terbuat dari bahan yang tidak baik.
- c. Pada umumnya kotor dengan tingkat kesehatan masyarakat rendah.
- d. dan penduduk memiliki kebiasaan menyimpang.

Hal tersebut tidak berbeda jauh dengan pendapat yang dikemukakan oleh Suparlan (n.d), dimana menurut Suparlan ciri-ciri permukiman kumuh adalah sebagai berikut:

- a. Fasilitas umum yang kondisinya kurang atau tidak memadai.
- b. Kondisi hunian dan permukiman serta penggunaan ruang-ruangnya mencerminkan penghuninya kurang mampu atau miskin.
- c. Tingkat frekuensi dan kepadatan volume yang tinggi dalam penggunaan ruang-ruang yang ada sehingga mencerminkan adanya kekacauan penataan ruang dan ketidakberdayaan ekonomi penghuninya.

Tidak jauh berbeda dengan suparlan, menurut Sinulingga (2005) kampung atau permukiman kumuh memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Penduduk sangat padat dengan jumlah antara 250 sampai 400 jiwa/ha.
- b. Jalan-jalan sempit tidak dapat dilalui oleh kendaraan roda empat karena lebarnya yang sempit, bahkan terkadang jalan-jalan di wilayah

permukiman kumuh sudah tersembunyi dibalik atap-atap rumah yang sudah bersinggungan satu sama lain.

- c. Fasilitas drainase sangat tidak memadai, bahkan terkadang terdapat jalan-jalan tanpa drainase, sehingga saat hujan kawasan ini tergenang air;
- d. Fasilitas pembuangan air kotor atau tinja yang sangat minim, bahkan terkadang ada yang membuang air kotor mereka ke saluran yang dekat dengan rumah ataupun ke sungai;
- e. Fasilitas penyediaan air bersih yang sangat minim, memanfaatkan air sumur dangkal, air hujan, atau membeli secara kalengan;
- f. Tata bangunan tidak teratur dan bangunan-bangunan pada umumnya tidak permanen atau bahkan terkadang banyak yang bersifat darurat;
- g. Rawan terhadap penularan penyakit;
- h. Pemilikan hak atas tanah biasanya tidak legal.

Selain itu Bergel (n.d) berpendapat bahwa permukiman kumuh dapat diidentifikasi dengan melalui beberapa karakteristik (Maryani 2002), yaitu:

- a. Kepadatan penduduknya tinggi;
- b. Penghuninya biasanya berpenghasilan rendah dan hidup di bawah garis kemiskinan;
- c. Kualitas permukiman rendah atau masuk ke dalam kriteria rumah dengan kondisi darurat dengan bahan bangunan masih tradisional dan mudah lapuk, seperti kayu, bambu, atau alang-alang;
- d. Kondisi kesehatan dan sanitasi rendah dengan ciri adanya penyebaran penyakit menular dan lingkungan fisik yang jorok;
- e. Langkanya pelayanan kota seperti mck, air minum, listrik, pembuangan limbah, atau sampah;
- f. Pertumbuhannya tidak terencana, sehingga tampilannya tidak teratur dan tidak terurus dalam hal bangunan, halaman, dengan jalan-jalan yang sempit serta tidak tersedianya ruang terbuka;
- g. Penghuni pada umumnya merupakan migran dari desa;
- h. Secara sosial mereka terisolasi dan status tanahnya seringkali tidak jelas.

2.7.4. Faktor Penyebab Terbentuknya Permukiman Kumuh

Penyebab keberadaan permukiman kumuh Menurut Khomarudin (1997) antara lain: (a) tingkat urbanisasi dan migrasi yang tinggi, terutama kelompok masyarakat berpenghasilan rendah; (b) sulitnya mencari pekerjaan; sulitnya mencicil atau menyewa rumah; (c) kurang tegasnya pelaksanaan peraturan perundang-undangan; (d) perbaikan lingkungan yang hanya dilakukan oleh para pemilik rumah dan disiplin warga yang lemah; (d) serta semakin sempitnya lahan permukiman dan tingginya harga tanah.

Menurut Nagamuwa dan Viking (2003) keadaan suatu permukiman yang kumuh mencerminkan keadaan ekonomi, sosial, dan budaya para penghuninya, dimana ciri-ciri suatu kawasan permukiman kumuh dapat tercermin dari penampilan fisik bangunan yang susunannya semakin tidak teratur, ditandai dengan banyaknya bangunan temporer serta kurangnya perawatan; pendapatan penduduknya rendah; kepadatan bangunan tinggi, dimana jarak antar bangunan sangat dekat dan susunan bangunan tidak terencana; kepadatan penduduk tinggi dan masyarakatnya heterogen; sistem sanitasi yang buruk; serta banyaknya penduduk pendatang yang bertempat tinggal dan menyewa rumah di kawasan tersebut (Surtiani, 2006).

Kota menawarkan berbagai kesempatan lebih besar daripada daerah perdesaan (Suharini, 2007). Sehingga tidak mengherankan apabila banyak penduduk dari perdesaan melakukan migrasi ke kota untuk memperbaiki kehidupannya. Migrasi dari desa ke kota ini menyebabkan penambahan penduduk kota menjadi sangat pesat. Sebagai akibatnya akan timbul berbagai masalah dalam pengadaan dan penataan ruang untuk permukiman, pendidikan, kesehatan, perdagangan, rekreasi, keagamaan, industri, olah raga, dan sebagainya.

Semakin menjamurnya keberadaan dan pertumbuhan permukiman kumuh, terutama di wilayah perkotaan terjadi karena dipicu oleh beberapa faktor, menurut

Doxiadis (1986) dua faktor utama yang menyebabkan pesatnya pertumbuhan permukiman kumuh di perkotaan adalah penambahan penduduk dan urbanisasi.

2.7.5 Proses Terbentuknya Permukiman Kumuh

Berdasarkan proses terbentuknya menurut Bourne (1981), permukiman kumuh dapat dibedakan menjadi dua tipe, yaitu permukiman kumuh yang terbentuk secara cepat dan permukiman kumuh yang terbentuk dalam waktu lama namun terjadi secara terus menerus (Rindarjono, 2010). Bourne juga menambahkan bahwa di Indonesia proses terbentuknya permukiman kumuh pada umumnya berlangsung cepat, yang terjadi karena proses penuaan bangunan ataupun pemadatan. Permukiman kumuh yang terbentuk akibat proses penuaan bangunan terjadi karena bangunan-bangunan yang ada tidak pernah diperbaharui dan diganti materialnya. Sementara itu permukiman kumuh yang terbentuk akibat pemadatan terjadi karena pemadatan di dalam rumah itu sendiri dan di luar rumah. Pemadatan yang terjadi di dalam rumah berupa pemadatan jumlah penghuni dalam satu rumah yang ukurannya tetap dari waktu ke waktu. Sedangkan pemadatan yang terjadi di luar rumah terjadi karena semakin padatnya bangunan yang ada di wilayah permukiman tersebut.

Sedangkan menurut Sutanto (1995), berdasarkan asal dan proses terjadinya permukiman kumuh dapat dibedakan atas tiga jenis (Suharini, 2007), yaitu:

1. Kumuh bangunan (*created*), dengan ciri:
 - a. Merupakan daerah hunian masyarakat ekonomi rendah;
 - b. Bangunan mudah dipindahkan;
 - c. Dibangun dengan bahan seadanya;
 - d. Sebagian besar dibangun sendiri oleh penghuni (kumuh dari awal).
2. Kumuh turunan (*generated*), dengan ciri:
 - a. Semula dibangun dengan izin, pada bagian kota lama yang kondisinya semakin memburuk sehingga menjadi kumuh;

- b. Merupakan desa lama yang dikepung oleh pemekaran kota yang cepat;
 - c. Bangunan dan prasarana kualitasnya merosot karena kurang pemeliharaan.
3. Kumuh dalam proyek perumahan (*in project housing*), dengan ciri:
- a. Kelompok proyek perumahan yang disediakan pemerintah bagi masyarakat dengan ekonomi lemah;
 - b. Rumah-rumah memperoleh pemeliharaan yang sangat jelek dari penghuni yang mengakibatkan kemerosotan jasa prasarana.

2.7.6 Morfologi Permukiman Kumuh

Berdasarkan pola morfologinya menurut Suharini (2007), permukiman kumuh dapat dibedakan atas enam kategori, yaitu: (a) permukiman kumuh di daerah permukiman (b) permukiman kumuh di sekitar kawasan industri (c) permukiman kumuh di sekitar badan air (d) permukiman kumuh di sepanjang jalan, rel kereta api, atau saluran pengatus (e) permukiman kumuh di daerah pertanian (e) permukiman kumuh di proyek perumahan.

2.7.7 Tipologi Permukiman Kumuh

Berdasarkan tipologinya, menurut Saraswati (2000) permukiman kumuh dapat dibedakan atas dua tipologi utama yaitu *squatter area* dan *slum area* (Auliannis, 2009). Perbedaan kedua tipologi ini dapat dilihat dari kondisi geografis dan status penggunaan tanahnya.

1. *Squater Area*

Squater area merupakan permukiman yang dibangun di suatu kawasan atau area permukiman yang merupakan tempat-tempat terlarang dan bersifat ilegal atau liar. Permukiman kumuh yang merupakan kategori *squater area* mempunyai karakteristik sebagai berikut:

a) Kondisi Fisik

Permukiman dengan tipologi *squater* memiliki karakteristik fisik: tidak layak menurut peruntukan ruang, kepadatan penduduk tinggi, prasarana sanitasi tidak berfungsi dengan baik, belum tersentuh oleh program peremajaan kota atau perbaikan kampung, tata letak bangunan tidak teratur, serta kondisi fisik bangunan buruk.

b) Kondisi Geografis

Secara geografis memiliki karakteristik: berlokasi di kawasan bantaran sungai atau area selebar 15 meter di kiri atau kanan sungai, dan berlokasi di pinggiran rel kereta api, di bawah jaringan listrik tegangan tinggi, di daerah jalur hijau, di tempat fasilitas umum yang sudah ataupun belum terbangun.

2. *Slum Area*

Slum area adalah permukiman kumuh yang secara geografis berada pada lokasi yang layak huni, namun tidak memiliki kondisi fisik lingkungan yang memadai. Secara hukum *slum area* diakui kepemilikannya atau bersifat legal. menurut Bintarto permukiman kumuh yang masuk dalam kategori *slum area* memiliki karakteristik kondisi lingkungan yang tidak sehat, dihuni oleh warga kota yang gagal secara ekonomi, serta adanya kebiasaan negatif dari masyarakat yang bermukim di dalamnya.

2.8 Indikator dan Tingkat Kekumuhan

Menurut Dirjen Perumahan dan Permukiman (2002) terdapat paling tidak 27 indikator tingkat kekumuhan suatu permukiman, yang diperoleh melalui penilaian terhadap berbagai aspek, seperti: lokasi, kependudukan, kondisi bangunan, kondisi sarana dan prasarana, serta kondisi sosial ekonomi.

Sementara itu menurut UN-HABITAT (2002) Indikator kekumuhan suatu permukiman dapat dilihat dari karakteristik yang dimiliki oleh permukiman tersebut, seperti akses dan ketersediaan air; keberadaan sanitasi; kualitas struktur rumah; kepadatan rumah; serta hak milik bangunan.

Tabel 2.1 Indikator Kekumuhan Menurut UN-HABITAT

Karakteristik	Indikator	Keterangan
Akses ke sumber air	Kurangnya persediaan air minum	Tidak memiliki persediaan air yang cukup jika kurang dari 50% rumah tangga yang memiliki persediaan air yang memadai berupa: <ul style="list-style-type: none"> (a) Hubungan antar rumah (b) Akses ke pipa air minum (c) Menampung air hujan
Akses terhadap sanitasi	Sanitasi kurang memadai	Tidak memiliki sanitasi yang baik jika kurang dari 50% rumah tangga memiliki sanitasi memadai berupa: <ul style="list-style-type: none"> (a) Saluran pembuangan/selokan umum (b) Septic tank (c) MCK
Kualitas struktur rumah	Lokasi	Proporsi rumah yang berada pada atau dekat dengan lokasi rawan, seperti: <ul style="list-style-type: none"> (a) Berada pada zona geologi berbahaya (b) Berada di sekitar tumpukan sampah (c) Berada di sekitar kawasan industri yang tercemar (d) berada di daerah yang tidak aman dan berisiko tinggi (seperti rel kereta api)
	Kepermanenan struktur rumah	Rumah dengan struktur bangunan yang buruk, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> (a) kualitas konstruksi (bahan untuk lantai dan dinding) (b) dilengkapi dengan kode bangunan
Kepadatan tinggi	Kepadatan tinggi	Rumah yang memiliki jumlah lebih dari dua orang/kamar (standar minimum ukuran lantai perorang 5 m ²)
Hak kepemilikan bangunan	Hak kepemilikan bangunan	<ul style="list-style-type: none"> (a) Rumah yang memiliki hak resmi atas tanah dan bangunan rumah (b) rumah yang memiliki hak resmi atas salah satu bangunan rumah atau tanah

Sumber: UN-HABITAT (2002)

2.9 Identifikasi Permukiman Kumuh Menggunakan Citra

Menurut Sati (1988), beberapa indikator yang dapat digunakan untuk menginterpretasi keberadaan permukiman kumuh menggunakan foto udara atau citra (Tabel 2.2) (Suharini, 2007).

Tabel 2.2 Indikator Interpretasi Permukiman Kumuh Menggunakan Foto Udara

No	Indikator	Harkat	Keterangan
1	Kepadatan bangunan		
	a. Rendah	3	< 150 unit/ha
	b. Sedang	2	150 – 300 unit/ha
	c. Tinggi	1	> 300 unit/ha
2	Ukuran Rumah		
	a. Rendah	3	> 7 meter
	b. Sedang	2	5 – 7 meter
	c. Tinggi	1	< 5 meter
3	Jenis Rumah		
	a. Permanen	3	Dinding dan atap terbuat dari bata dan beton
	b. Semi permanen	2	Dinding dari beton dan atap dari seng/genteng
	c. Darurat	1	Dinding dan atap terbuat dari bambu, papan, jerami, rumput, atau bahan lepas lain
4	Kejelasan persil bangunan		
	a. Jelas	3	Persil – persil terlihat dengan jelas
	b. Sebagian jelas	2	Persil – persil tidak begitu jelas terlihat
	c. Tidak jelas	1	Persil – persil tidak terlihat jelas
5	Aksesibilitas		
	a. Terlihat	3	Jalan internal/lorong terlihat dengan jelas
	b. Sebagian terlihat	2	Hanya sebagian jalan internal/lorong yang terlihat
	c. Tidak terlihat	1	Jalan internal/lorong sama sekali tidak terlihat
6	Lokasi medan		
	a. Sesuai	3	Tapak datar dan kering
	b. Kurang Sesuai	2	Tapak lebih rendah dari jalan/rel kereta api
	c. Tidak Sesuai	1	Tapak pada lahan rawan, tanggul kolam, kanal, dekat saluran air (situ/sungai), atau di daerah rawan banjir

Sumber: Sati, 1988 (dalam Suharini, 2007)

Tabel 2.3 Indikator Verifikasi Permukiman Kumuh/uji lapang

No	Indikator	Harkat	Keterangan
1	Prasarana (air, sanitasi, listrik)		
	a. Mencukupi	3	Prasarana ada dan mencukupi
	b. Terbatas	2	Prasarana ada tapi tidak mencukupi
	c. Tidak ada	1	Tidak semua prasarana ada
2	Kondisi Aksesibilitas		
	a. Jalan aspal	3	Jalan/lorong di aspal
	b. Jalan bukan aspal	2	Jalan/lorong diperkeras dengan batu atau semen Yang ada hanya jalan setapak
	c. Jalan setapak	1	
3	Kondisi Rumah (Tinggi langit-langit, ventilasi, dan kondisi lantai)		
	a. Bagus	3	
	b. Cukup	2	
	c. Tidak jelas	1	
4	Pemilikan		
	a. Hak milik	3	Rumah dimiliki penghuni
	b. Disewa	2	Penghuni membayar sewa rumah
	c. Tidak jelas	1	Rumah dibangun secara ilegal pada tanah tak bertuan
5	Fasilitas (sekolah, rumah sakit/puskesmas, pasar)		
	a. Mencukupi	3	Letaknya antara radius 0,5 – 1 Km
	d. Terbatas	2	Dalam radius 1 – 2,5 Km
	e. Kurang	1	Dalam radius lebih dari 2,5 Km
6	Pekerjaan Penduduk		
	a. Bekerja untuk sendiri	3	Penghuni melakukan usaha keluarga pada sektor
	b. Dinas atau pelayanan	2	informal
	c. Pekerja Kasual	1	Penghuni bekerja pada pemerintah/swasta Penghuni bekerja secara kasual dengan upah harian

Sumber: Sati, 1988 (dalam Suharini, 2007)

2.10 Penelitian-penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan terkait permukiman kumuh di Departemen Geografi, Universitas Indonesia antara lain oleh Rebekka (1991), Aulianis (2009), dan Arsalan (2006).

Rebekka (1991), dengan penelitiannya yang berjudul *Penyebaran Permukiman Kumuh Kecamatan Tambora, Tamansari, dan Grogol Petamburan (Jakarta Barat)*. Metode penelitian yang digunakan oleh Rebekka adalah analisis deskriptif dengan meng-*overlay*-kan peta penggunaan tanah, harga tanah, dan kualitas prasarana serta analisis kuantitatif menggunakan *Contingency Coefficient*. Hasil Penelitian Rebekka ini menunjukkan bahwa permukiman kumuh di daerah penelitiannya memiliki kecenderungan mendekati kawasan perdagangan dan jasa pada wilayah dengan harga tanah tinggi.

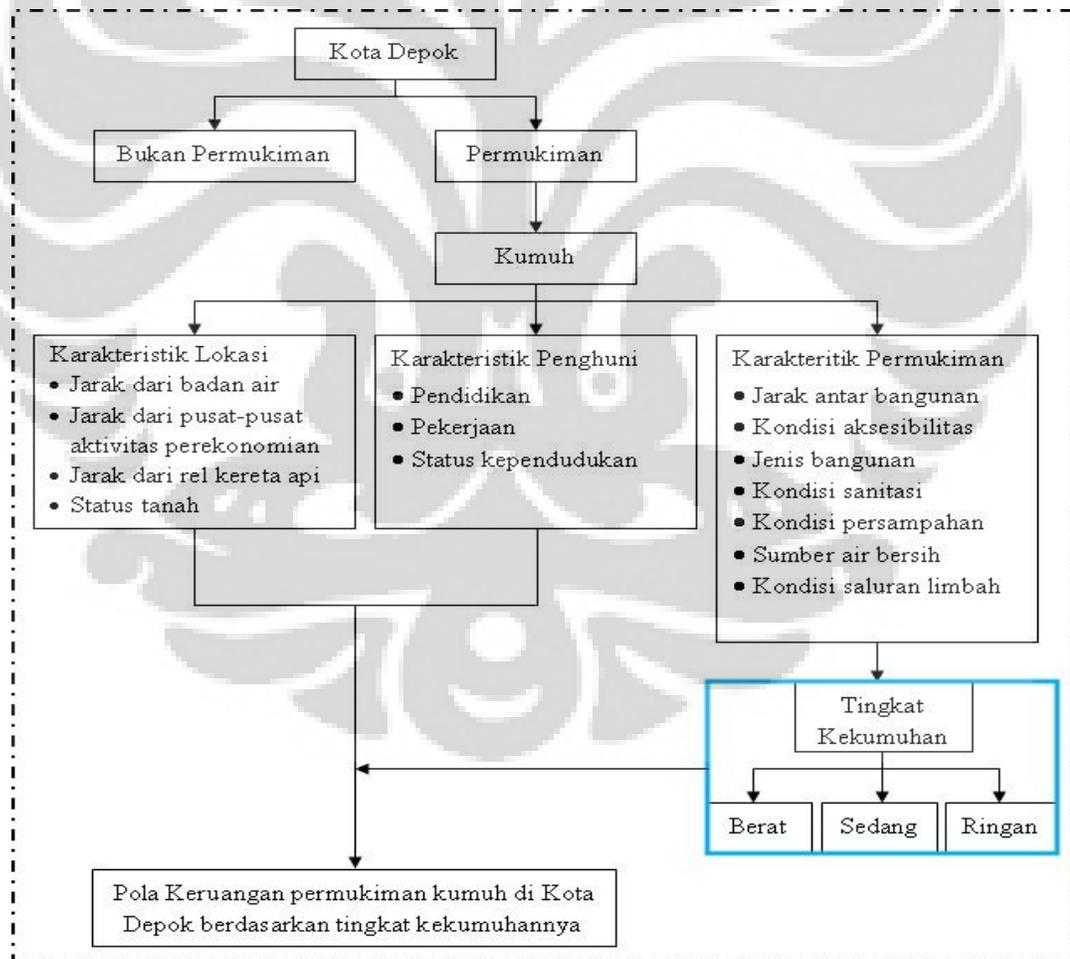
Arsalan (2006), dengan penelitiannya yang berjudul *Permukiman Kumuh di Provinsi DKI Jakarta*. Penelitian yang dilakukan oleh Arsalan ini membahas tentang pola persebaran serta karakteristik fisik dan sosial permukiman kumuh. Metode yang digunakan oleh Arsalan dalam penelitiannya ini adalah analisis deskriptif dan analisis tetangga terdekat. Hasil dari penelitian Arsalan ini menunjukkan bahwa permukiman kumuh di daerah penelitiannya memiliki pola persebaran bergerombol dan tersebar dengan karakteristik kumuh berat, sedang, dan rendah yang dipengaruhi oleh lokasi berupa bantaran sungai, rel kereta api, gang sempit, sekitar pusat kegiatan utama, pelabuhan laut, dan bawah jalan tol.

Auliannis (2009), dengan penelitiannya yang berjudul *Permukiman Kumuh di Kota Bandung*. Penelitian yang dilakukan oleh Auliannis ini membahas tentang pola persebaran permukiman kumuh di Kota Bandung. Metode analisis yang digunakan oleh Auliannis dalam penelitiannya adalah metode analisis deskriptif dan analisis tetangga terdekat. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Auliannis ini adalah permukiman kumuh yang ada di Kota Bandung tersebar secara mengelompok dan acak.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Alur Pikir Penelitian

Dalam penelitian ini bagian dari Kota Depok yang dikaji adalah permukiman yang kumuh. Permukiman kumuh kemudian dikaji karakteristik permukiman, karakteristik lokasi, dan karakteristik penghuninya. Dari hasil pengkajian tentang karakteristik permukiman kumuh tersebut dilakukan penilaian terhadap tingkat kekumuhan permukiman kumuh di Kota Depok. Selanjutnya secara deskriptif dijabarkan tentang keterkaitan antara tingkat kekumuhan dengan karakteristik lokasi dan karakteristik sosial ekonomi penghuninya.



Gambar 3.1 Alur Pikir Penelitian

3.2 Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Variabel Bebas (independen)
 - a. Jarak dengan indikator berupa jarak dari badan air (sungai dan situ), jarak dari rel kereta api, dan jarak dari pusat aktivitas ekonomi;
 - b. Kondisi Sosial Ekonomi Penduduk dengan indikator pendidikan, pekerjaan, dan status kependudukan.
 - c. Status Tanah, yaitu dibagi atas tanah dengan hal milik dan tanah negara
2. Variabel Terikat (dependen)
 - a. Tingkat Kekumuhan dengan indikator jarak antar bangunan, kondisi aksesibilitas, jenis bangunan, kondisi sanitasi, persampahan, penyediaan air bersih, sarana pembuangan limbah, dan pekerjaan penduduk;

3.3 Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui survei langsung ke lapang. Pengumpulan data survei lapang dilakukan dengan cara observasi atau pengamatan kondisi permukiman-permukiman yang teridentifikasi memiliki potensi sebagai permukiman kumuh dari hasil identifikasi menggunakan citra untuk mengetahui tingkat kekumuhannya. Selain itu juga dilakukan wawancara dengan penduduk yang ada di lokasi-lokasi yang diketahui kumuh dari hasil observasi untuk mengetahui karakteristik sosial dan ekonomi penduduk yang tinggal di permukiman tersebut. Sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai instansi yang relevan dengan penelitian ini. Data-data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Administrasi dan Jaringan Jalan Kota Depok

Data administrasi dan jaringan jalan Kota Depok yang digunakan dalam penelitian ini adalah data tahun 2010 yang bersumber dari peta administrasi dan

jaringan dari Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kota Depok dengan format shp (*shapefile*).

2. Data Penggunaan Tanah Kota Depok

Data penggunaan tanah Kota Depok Tahun 2010 yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kota Depok dengan format shp.

3. Data Jaringan Sungai Kota Depok

Data jaringan sungai yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari peta wilayah administrasi Kota Depok dengan skala 1 : 110.000 dari Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kota Depok.

4. Data Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Depok

Data Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari peta rencana pola ruang Kota Depok tahun 2010-2030 dengan skala 1:75.000 dari Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kota Depok.

5. Data Kepadatan Bangunan

Data Kerapatan bangunan yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari hasil interpretasi citra Quickbird tahun 2010. Interpretasi kepadatan bangunan dilakukan dengan menghitung jumlah atap rumah yang terlihat pada citra Quickbird kemudian membaginya dengan luas area permukiman.

6. Data Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kota Depok

Data jumlah dan kepadatan penduduk yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari data jumlah dan kepadatan penduduk menurut kecamatan di Kota Depok yang bersumber dari Data Kota Depok Dalam Angka tahun 2010 dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Depok.

7. Data Tata Letak Permukiman

Data tata letak permukiman yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari hasil digitasi citra Quickbird Kota Depok tahun 2010 dan pengolahan data

permukiman dari peta penggunaan tanah Kota Depok tahun 2010 dengan format shp yang diperoleh dari Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kota Depok.

8. Data Tingkat Kekumuhan Permukiman Kumuh

Data ini diperoleh dengan melakukan penilaian dengan menggunakan beberapa indikator (lihat Tabel 3.1). Berbagai data yang berhubungan dengan indikator tingkat kekumuhan tersebut diperoleh melalui survei lapang dengan cara melakukan mewawancarai terhadap penduduk yang bermukim di wilayah penelitian.

3.4 Pengolahan Data

3.4.1 Pengolahan Data Sekunder

Setelah semua data sekunder terkumpul, maka data-data tersebut kemudian diolah menggunakan software ArcGIS 9.3 untuk menghasilkan peta-peta tematik berupa: Peta Administrasi Kota Depok skala 1:110.000, Peta Jaringan Jalan Kota Depok skala 1:110.000, Peta Penggunaan Tanah Kota Depok Tahun 2010 skala 1:110.000, Peta Permukiman Kota Depok Tahun 2010 skala 1:110.000, Peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Depok Tahun 2010-2030 skala 1:110.000.

3.4.2 Identifikasi Permukiman Kumuh

Identifikasi lokasi permukiman kumuh dilakukan dengan menggunakan Citra Quickbird tahun 2010 yang diperoleh dari Dinas Permukiman dan Tata Ruang Wilayah Kota Depok. Identifikasi lokasi permukiman kumuh dilakukan dengan menggunakan indikator: kepadatan bangunan, tata letak bangunan, jenis atap, kejelasan persil bangunan, kenampakan aksesibilitas (jalan/lorong) pada Citra Quickbird, serta kesesuaian medan atau lokasi (lihat Tabel 3.1). Selanjutnya hasil identifikasi berupa lokasi-lokasi yang memiliki potensi sebagai permukiman kumuh pada kenampakan Citra Quickbird tersebut didigit sehingga menghasilkan Peta Lokasi Permukiman Kumuh Hasil Identifikasi Citra.

Tabel 3.1 Indikator Interpretasi Permukiman Kumuh Menggunakan Citra Quickbird

No	Indikator	Keterangan
1	Kepadatan bangunan	> 150 unit/ha
2	Tata letak bangunan	> 60% teratur
3	Jenis atap	> 60% bukan genteng
4	Kejelasan persil bangunan	Persil – persil tidak terlihat jelas
5	Aksesibilitas	Hanya sebagian jalan internal/lorong yang dapat terlihat atau jalan internal/lorong sama sekali tidak terlihat
6	Lokasi medan	Pada tapak lebih rendah dari jalan/rel kereta api atau tapak pada lahan rawan (dekat sungai, situ)

Sumber: *Modifikasi Sati, 1988 (dalam Suharini, 2007)*

Selanjutnya di lokasi-lokasi permukiman yang berpotensi sebagai permukiman kumuh dari hasil pengolahan Citra Quickbird dengan menggunakan indikator-indikator pada Tabel 3.1 dilakukan survei lapang untuk memastikan apakah lokasi-lokasi tersebut benar-benar kumuh atau tidak dengan menggunakan indikator-indikator pada Tabel 3.2. Permukiman-permukiman yang kemudian teridentifikasi sebagai permukiman kumuh setelah survei lapang, ditentukan nilai indikatornya untuk mengetahui tingkat kekumuhannya dengan menggunakan penilaian indikator-indikator seperti pada Tabel 3.2. Masing-masing indikator dengan tingkatan ringan diberi nilai 1, lokasi dengan nilai sedang diberi nilai 2, serta 3 untuk lokasi dengan nilai berat. Selanjutnya dilakukan penghitungan nilai total tingkat kekumuhan permukiman kumuh untuk menentukan tingkat kekumuhannya (lihat Tabel 3.3). Selanjutnya dari hasil penilaian tingkat kekumuhan dibuat peta tingkat kekumuhan permukiman kumuh di Kota Depok.

Tabel 3.2 Indikator Verifikasi Permukiman Kumuh/uji lapang

No	Indikator	Keterangan
1	Jarak Antar Bangunan	
	a. Ringan	Sebagian besar berjarak >2 meter
	b. Sedang	Sebagian besar berjarak 1 - 2 meter
	c. Berat	Sebagian besar berjarak <1 meter
2	Kondisi Aksesibilitas	
	a. Ringan	>50% jalan aspal
	b. Sedang	>50% jalan/lorong yang diperkeras dengan semen atau batu
	c. Berat	>50% jalan setapak tanah
3	Jenis Bangunan	
	a. Ringan	>50% permanen
	b. Sedang	>50% semi permanen
	c. Berat	>50% darurat
4	Kondisi Sanitasi	
	a. Ringan	>50% rumah tangga memiliki sanitasi memadai
	a. Sedang	50-30% rumah tangga memiliki sanitasi memadai
	b. Berat	<30% rumah tangga memiliki sanitasi memadai
5	Persampahan	
	a. Ringan	Diangkut petugas/ke pasar
	b. Sedang	Bakar
	c. Berat	Sungai/tanah kosong/situ
6	Penyediaan Air Bersih	
	a. Ringan	Sumber air dari pdam
	b. Sedang	Sumber air minum air tanah
	c. Berat	Sumber lain dengan jarak >7 meter dari tempat tinggal/bersama
7	Saluran Limbah	
	a. Ringan	Septic tank
	b. Sedang	Saluran ke situ/sungai
	c. Berat	Tanpa saluran
8	Pekerjaan Penduduk	
	a. Ringan	<50% penduduk bekerja di sektor informal
	b. Sedang	50-75% penduduk bekerja di sektor informal
	c. Berat	>75% penduduk bekerja di sektor informal

Sumber: modifikasi Sati, 1988 (dalam Suharini, 2007)

Tabel 3.3 Penilaian Tingkat Kekumuhan Total

No	Nilai Total Indikator	Tingkat Kekumuhan
1	<14	Ringan
2	14 – 18	Sedang
3	> 18	Berat

3.5 Analisis Data

Analisis untuk menjawab pertanyaan masalah adalah menggunakan pendekatan keruangan dengan tema analisis pola keruangan dan metode deskriptif dengan unit analisis berupa area tingkatan kekumuhan. Analisis pola keruangan dilakukan dengan melihat kekhasan sebaran tingkat kekumuhannya terhadap jarak dari badan air (sungai dan situ), jarak dari rel kereta api, jarak dari pusat ekonomi. Untuk melihat kekhasan sebaran dilakukan pengkelasan jarak lokasi permukiman kumuh berdasarkan tingkat kekumuhannya dari badan air (sungai dan atau situ), jarak dari rel kereta api, serta jarak dari pusat ekonomi (lihat Tabel 3.4).

Area yang berada pada jarak kurang dari 15 meter dari sungai, kurang dari 50 meter dari situ, dan kurang dari 20 meter dari rel kereta api dijadikan area dengan kelas jarak dekat karena area yang berada pada jarak tersebut berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Garis Sempadan merupakan lokasi sempadan yang seharusnya tidak boleh dibangun. Sedangkan area dengan jarak kurang dari 0,5 km atau 500 meter pada penelitian ini dianggap sebagai lokasi dengan kelas jarak dekat dari pusat-pusat aktivitas ekonomi dengan asumsi bahwa pada area yang berjarak kurang dari 500 meter tersebut penghuni permukiman kumuh masih dapat mencapai lokasi pusat aktivitas ekonomi hanya dengan berjalan kaki.

Selanjutnya dilakukan analisis kondisi sosial ekonomi penduduk yang bermukim di masing-masing tingkat kekumuhannya untuk mengambil kesimpulan umum tentang kondisi sosial ekonomi penduduk yang tinggal di setiap tingkatan kekumuhan.

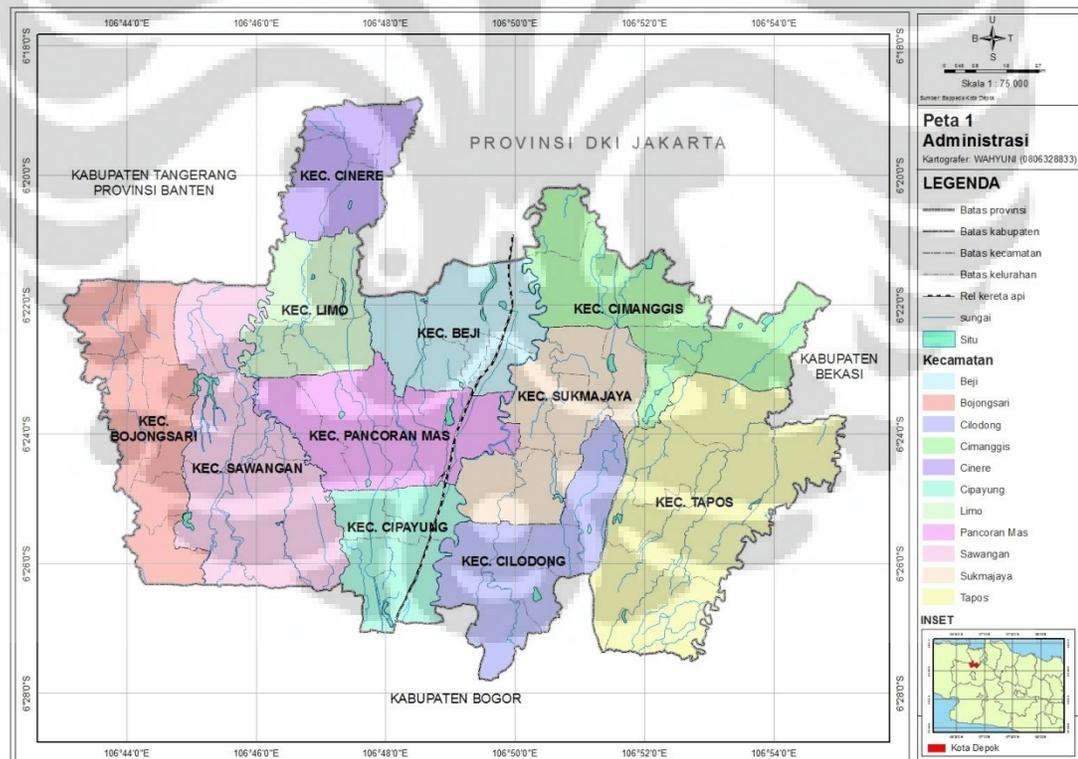
Tabel 3.4 Pengkelasan Jarak dalam Analisis

No	Jarak	Kelas Jarak
1	Dari Sungai a. <15 meter b. 15-50 meter c. >50 meter	Dekat Sedang jauh
2	Dari Situ a. <50 meter b. 50-75 meter c. >75 meter	Dekat Sedang jauh
3	Dari Rel Kereta Api a. <20 meter b. 20-100 meter c. >100 meter	Dekat Sedang jauh
4	Dari Pusat Ekonomi a. <0,5 km b. 0,5 – 1 km c. >1 km	Dekat Sedang jauh

BAB IV GAMBARAN UMUM KOTA DEPOK

4.1 Letak Kota Depok

Secara astronomis Kota Depok berada pada $6^{\circ} 19'00''$ - $6^{\circ} 28'00''$ Lintang Selatan dan $106^{\circ}43'00''$ - $106^{\circ}55'30''$ Bujur Timur. Sedangkan secara geografis Kota Depok berbatasan dengan Kabupaten Tangerang dan Daerah Khusus Ibukota Jakarta di sebelah utara; Kota Bekasi dan Kabupaten Bogor di sebelah timur; serta Kabupaten Bogor di sebelah selatan dan barat (lihat Gambar 4.1). Letak Kota Depok yang diapit oleh Kota Jakarta dan Kota Bogor sangat strategis sehingga Kota Depok semakin tumbuh pesat seiring dengan meningkatnya perkembangan jaringan transportasi yang tersinkronisasi secara regional dengan kota-kota lainnya (BPS Kota Depok, 2010).



Gambar 4.1 Peta Administrasi Kota Depok

sumber: Hasil pengolahan data (2012)

4.2 Pemerintahan

Secara administratif Kota Depok merupakan sebuah kotamadya yang menjadi bagian dari Propinsi Jawa Barat. Luas wilayah Kota Depok sekitar 200,29 km² atau 20.504,54 ha yang terdiri atas 11 kecamatan dengan 63 kelurahan (lihat Tabel 4.1), 871 Rukun Warga (RW), dan 45.856 Rukun Tetangga (RT) (BPS Kota Depok, 2010).

Tabel 4.1 Nama Kecamatan dan Kelurahan di Kota Depok

No	Kecamatan	Kelurahan
1	Sawangan	Pengasinan, Bedahan, Pasir Putih, Sawangan, Sawangan Baru, dan Kedaung.
2	Bojongsari	Cinangka, Duren Seribu, Duren Mekar, Bojongsari, Bojongsari Baru, Curug, Pondok Petir, dan Serua.
3	Pancoran Mas	Depok, Depok Jaya, Mampang, Rangkepan Jaya, Rangkepan Jaya Baru, dan Pancoran Mas.
4	Cipayung	Ratu Jaya, Cipayung, Bojong Pondok Terong, pondok Jaya, dan Cipayung Jaya.
5	Sukmajaya	Sukmajaya, Tirtajaya, Mekarjaya, Abadijaya, Baktijaya, dan Cisalak.
6	Cilodong	Kalimulya, Jatimulya, Kalibaru, Cilodong, dan Sukamaju
7	Cimanggis	Curug, Harjamukti, Cisalak Pasar, Mekarsari, Tugu, dan Pasir Gunung Selatan
8	Tapos	Cilangkap, Cimpaeun, Tapos, Leiwinanggung, Jatijajar, Sukamaju Baru dan Sukatani.
9	Beji	Beji, Beji Timur, Kukusan, Tanah Baru, Kemiri Muka, dan Pondok Cina
10	Limo	Merayung, Grogol, Krukut, dan Limo
11	Cinere	Cinere, Gandul, Pangkalan Jati, dan pangkalan Jati Baru

Sumber: BPS Kota Depok (2010)

4.3 Kondisi Iklim dan Fisik Wilayah Kota Depok

Secara umum bentang alam Kota Depok dari Selatan ke Utara adalah dataran rendah sampai perbukitan bergelombang lemah, dengan elevasi antara 50 - 140 mdpl dan kemiringan lereng kurang dari 15% (BPS Kota Depok, 2010).

Kota Depok merupakan daerah dengan iklim tropis yang dipengaruhi oleh angin muson dengan musim kemarau bulan April - September dan musim hujan bulan

Oktober sampai Maret dengan curah hujan 2684 mm/th dan temperatur rata-rata antara 24,3-33°C (Bappeda Kota Depok, 2010). Kota Depok dialiri oleh dua sungai besar, yaitu Ciliwung dan Cisadane serta 13 sub Satuan Wilayah Aliran Sungai. Disamping itu, di Kota Depok juga terdapat sekitar 30 situ (BPS Kota Depok, 2010).

4.4 Penggunaan Tanah Kota Depok

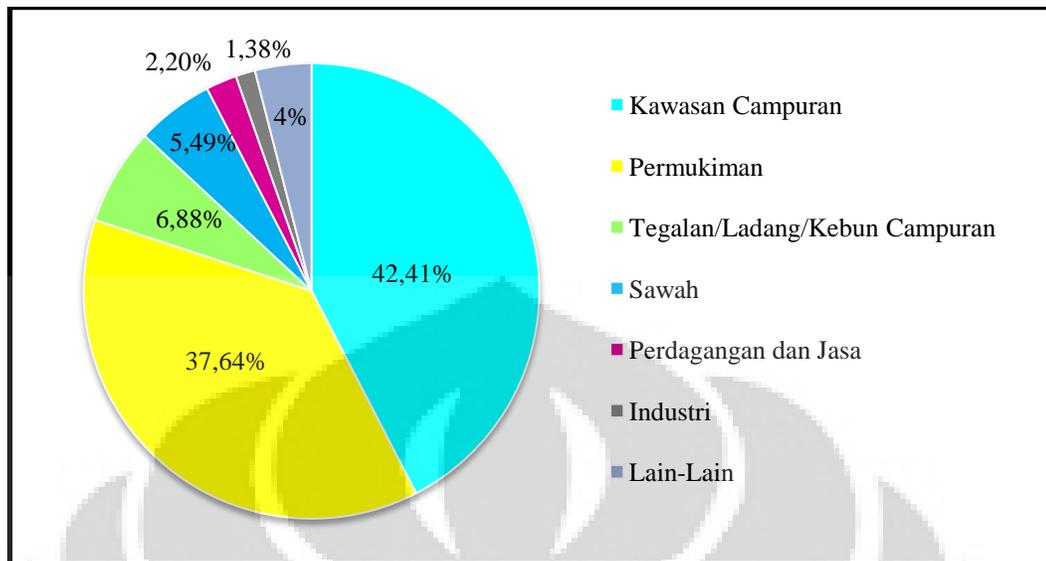
Penggunaan tanah di Kota Depok terdiri atas permukiman, kawasan campuran, tegalan/ladang/kebun campuran, sawah, perdagangan dan jasa, industri, dan penggunaan tanah lain dengan luasan kecil seperti kawasan militer, gardu listrik, Radar Auri, perguruan tinggi, depo KRL, fasilitas umum/sosial/perkantoran, pemancar RRI, lapangan golf, RPH, TVRI, dan taman (lihat Peta 2).

Kawasan campuran adalah penggunaan tanah paling mendominasi di Kota Depok yang memiliki luas sekitar 8.695,45 ha dengan presentase luas penggunaan mencapai 42,41% dari keseluruhan luas Kota Depok (lihat Tabel 4.2 dan Gambar 4.2). Kawasan Campuran menurut Perda Kota Depok No 2 Tahun 2009 merupakan kawasan yang diarahkan dan diperuntukan bagi pengembangan kegiatan campuran bangunan umum dengan permukiman beserta fasilitasnya. Selanjutnya penggunaan tanah kedua yang mendominasi penggunaan tanah di Kota Depok adalah penggunaan tanah berupa permukiman dengan luas penggunaan sekitar 7.717,44 ha atau 37,64% dari luas keseluruhan wilayah Kota Depok.

Tabel 4.2 Luasan dan Presentase Penggunaan Tanah di Kota Depok

No	Jenis penggunaan Tanah	Luas (ha)	Persentase (%)
1	Kawasan Campuran	8.695,45	42,41
2	Permukiman	7.717,44	37,64
3	Tegalan/Ladang/Kebun Campuran	1.410,80	6,88
4	Sawah	1.125,58	5,49
5	Perdagangan dan Jasa	450,70	2,20
6	Industri	283,52	1,38
7	Lain-Lain	821,05	4,00
Total		20.504,54	100,00

Sumber: Hasil pengolahan data (2012)



Gambar 4.2 Presentase luas Penggunaan Tanah Kota Depok Tahun 2010

sumber: Hasil pengolahan data (2012)

4.5 Jaringan Jalan Kota Depok

Sebagai sebuah Kota yang keseluruhan wilayahnya berupa daratan, sarana jalan memiliki peranan penting dalam perkembangan Kota Depok. Pada tahun 2010 panjang jalan di Kota Depok menurut status pemerintah yang berwenang adalah sekitar 514,84 km dengan panjang jalan negara 30,77 km, jalan provinsi 11,50 km, dan jalan kota 472,57 km dengan kondisi jalan mantap (baik sampai sedang) sepanjang 425,75 km dan jalan dengan kondisi tidak mantap (rusak ringan sampai rusak berat) sepanjang 89,09 km (BPS Kota Depok, 2010). Sementara itu berdasarkan fungsinya jalan di Kota Depok terdiri atas jalan tol, arteri primer, arteri sekunder, kolektor primer, dan jalan kolektor sekunder (lihat Peta 3).

4.6 Permukiman di Kota Depok

Sebagai sebuah kota, Kota Depok merupakan tempat bermukim bagi penduduknya. Selain itu Kota Depok juga menjadi salah satu alternatif pilihan bagi para migran baik yang berasal dari Kota Jakarta yang mulai mengalami penurunan kualitas sebagai tempat bermukim maupun dari berbagai daerah lain di Indonesia

sebagai tempat untuk bermukim. Permukiman di Kota Depok merupakan jenis penggunaan tanah dengan luasan kedua terluas dari sekian banyak penggunaan tanah yang ada.

Menurut Bappeda (2010) di Kota Depok terdapat sebanyak 4.132 rumah tidak layak huni yang tersebar di 6 kecamatan. Kecamatan Cimanggis merupakan daerah dengan rumah tidak layak huni terbanyak, yaitu berjumlah 2.081 rumah. Disusul kemudian oleh Kecamatan Sawangan 947 rumah, Kecamatan Pancoranmas 557 rumah, Kecamatan Limo 226 rumah, Kecamatan Sukmajaya 221 rumah, dan kecamatan Beji 60 rumah.

Permukiman di Kota Depok terutama mendominasi penggunaan lahan di bagian utara Kota Depok, yaitu di Kecamatan Cinere, limo, Pancoran Mas, Sukmajaya, dan Cimanggis. Sedangkan pada bagian selatan Kota Depok penggunaan tanah untuk permukiman tidak terlalu mendominasi (lihat Peta 4).

Dilihat dari tata letaknya, permukiman di Kota Depok dapat dibedakan atas dua tipe tata letak, yaitu permukiman dengan tata letak teratur dan permukiman dengan tata letak tidak teratur. Dari hasil pengolahan data diketahui bahwa permukiman di Kota Depok memiliki luasan sekitar 7.717,58 ha atau 37,64% dari keseluruhan luas wilayah Kota Depok. Permukiman dengan tata letak teratur memiliki luas sekitar 2.312,58 ha atau 29,97% dari keseluruhan keseluruhan luas wilayah permukiman yang ada di Kota Depok. Sementara itu permukiman dengan tata letak tidak teratur memiliki luas sekitar 70,03% dari keseluruhan luas keseluruhan permukiman yang ada di Kota Depok dengan luas sekitar 5.405,00 ha (lihat Tabel 4.3).

Tabel 4.3 Luas Permukiman di Kota Depok Berdasarkan Tata Letaknya

No	Tata Letak Permukiman	Luas (ha)	Presentase (%)
1	Teratur	2.312,58	29,97
2	Tidak Teratur	5.405,00	70,03
Total		7.717,58	100,00

Sumber: Hasil pengolahan data (2012)

4.7 Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Depok 2010 – 2030

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Depok selama jangka waktu dua puluh tahun (2010-2030), Kota Depok direncanakan akan diperuntukkan untuk berbagai peruntukan, seperti: permukiman, kawasan perdagangan retail dan jasa, kawasan perkantoran dan jasa, pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, industri, hutan, RPH, CBD, dan lain-lain (lihat Peta 5).

Sebagai Kota yang menjadi alternatif pilihan tempat bermukim bagi penduduk, terutama yang bekerja di Kota Jakarta maka permukiman merupakan peruntukan ruang paling luas yang direncanakan oleh pemerintah Kota Depok sampai tahun 2030. Ruang yang direncanakan akan diperuntukkan untuk permukiman hingga tahun 2030 adalah sekitar 15.380,37 ha atau 73,99% dari keseluruhan luas wilayah Kota Depok yang mencakup permukiman yang sudah ada tahun 2010 serta permukiman yang akan dikembangkan hingga tahun 2030. Permukiman di Kota Depok diperkirakan terdiri atas permukiman dengan kepadatan bangunan rendah, kepadatan bangunan sedang, serta kepadatan bangunan tinggi. Permukiman dengan kepadatan bangunan sedang mendominasi dengan luasan sekitar 8.450,60 ha atau sekitar 40,66% dari keseluruhan luas wilayah Kota Depok (lihat Tabel 4.4). Permukiman dengan tingkat kepadatan sedang tersebut tersebar di wilayah bagian utara Kota Depok, meliputi Kecamatan Cinere, Limo, Beji, Pancoran Mas, Sukmajaya, dan Cimanggis. Ruang yang diperuntukkan untuk permukiman kepadatan rendah adalah seluas 6.369,54 ha atau sekitar 30,64% di wilayah bagian selatan dan barat Kota Depok yang meliputi Kecamatan Bojongsari, Sawangan, Tapos, dan Cilodong. Sedangkan ruang yang diperuntukkan untuk permukiman kepadatan bangunan tinggi adalah sekitar 560,22 ha atau 2,70% dari keseluruhan luas wilayah Kota Depok yang meliputi sebagian kecil wilayah Kecamatan Sukmajaya, Beji, dan Pancoran Mas.

Dari aspek ekonomi kawasan perdagangan retail dan jasa merupakan kawasan dengan luasan paling luas, yaitu sekitar 753,12 ha atau 3,62% dari keseluruhan luas wilayah Kota Depok. Kawasan industri merupakan kawasan yang direncanakan

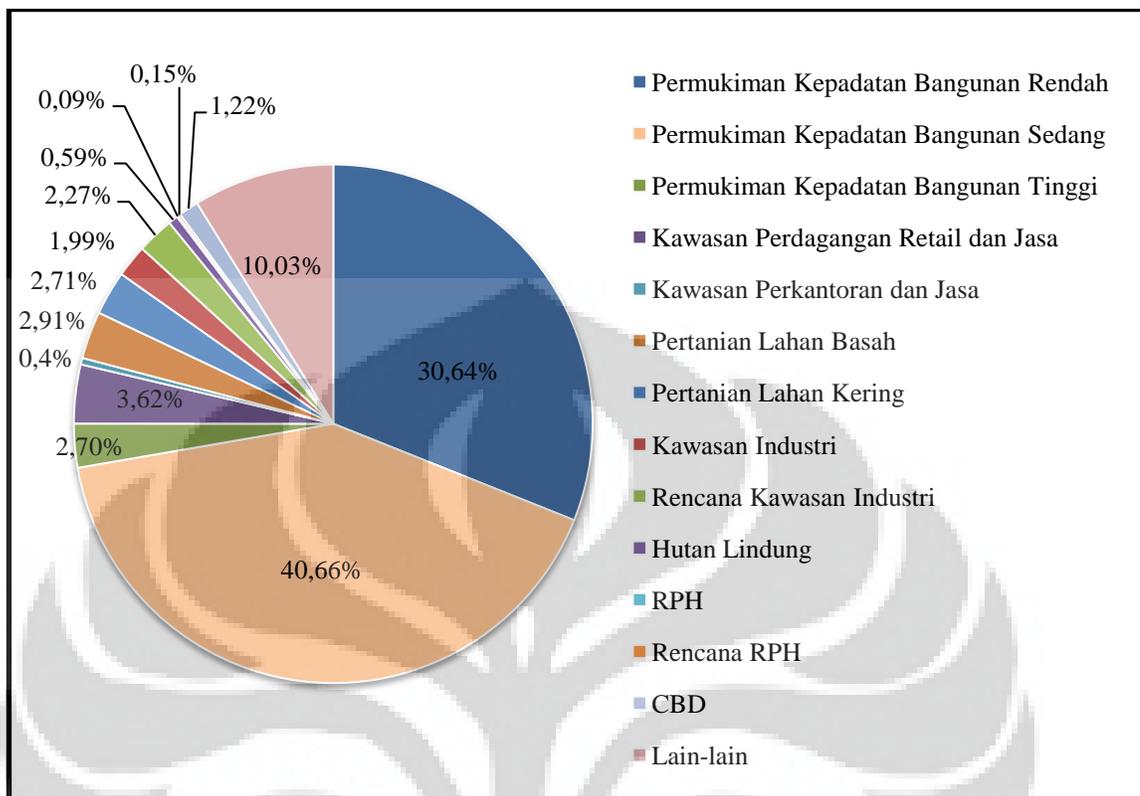
semakin luas peruntukannya hingga tahun 2030, dimana luasan kawasan industri hingga tahun 2010 adalah sekitar 414,40 ha atau 1,99% dari keseluruhan luas wilayah direncanakan menjadi 886,54 ha atau 4,27% dari keseluruhan luas wilayah Kota Depok, terutama di wilayah bagian timur Kota Depok.

Sementara itu lahan yang direncanakan akan diperuntukkan untuk pertanian adalah seluas 1.169,44 ha atau sekitar 5,62 % dari keseluruhan luas wilayah Kota Depok. Dimana 51,78% diantaranya diperuntukkan untuk pertanian lahan basah dan 48,22% sisanya untuk pertanian lahan kering. Selain itu hutan lindung direncanakan akan memiliki luas sekitar 123,4 ha atau 0,59% dari keseluruhan luas wilayah Kota Depok (lihat Tabel 4.4).

Tabel 4.4 Luasan Peruntukan Ruang Kota Depok Tahun 2010 - 2030

No	Rencana Peruntukan Ruang	Luas (ha)	Presentase Luas (%)
1	Permukiman Kepadatan Bangunan Rendah	6.369,54	30,64
2	Permukiman Kepadatan Bangunan Sedang	8.450,60	40,66
3	Permukiman Kepadatan Bangunan Tinggi	560,22	2,70
4	Kawasan Perdagangan Retail dan Jasa	753,12	3,62
5	Kawasan Perkantoran dan Jasa	83,20	0,40
6	Pertanian Lahan Basah	605,56	2,91
7	Pertanian Lahan Kering	563,88	2,71
8	Kawasan Industri	414,40	1,99
9	Rencana Kawasan Industri	472,15	2,27
10	Hutan Lindung	123,04	0,59
11	RPH	19,48	0,09
12	Rencana RPH	31,58	0,15
16	CBD	254,02	1,22
17	Lain-lain	1.803,74	10,03
Total		20.504,54	100,00

Sumber: Perhitungan luas data shp hasil digitasi peta rencana pola ruang Kota Depok 2010-2030 (2012; dari Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kota Depok, 2010)



Gambar 4.3 Persentase Luas Peruntukan Ruang Kota Depok, 2010-2030

Sumber: Hasil pengolahan data (2012)

4.8 Demografi Kota Depok

Dari data Kota Depok Dalam Angka tahun 2010 diketahui bahwa pada tahun 2010 jumlah penduduk kota Depok mencapai 1.736.564 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 10.101 jiwa /km². Kecamatan Cimanggis merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak, yaitu sebanyak 242.214 jiwa dengan kepadatan penduduk 11.374 jiwa /km². Sedangkan Kecamatan Limo merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit yaitu sebanyak 87.615 jiwa dengan kepadatan penduduk 7.226 jiwa /km² (lihat Tabel 4.5).

Sementara itu Kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi adalah Kecamatan Pancoran Mas, yaitu dengan kepadatan penduduk 11.568 jiwa /km². Sedangkan kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah adalah Kecamatan

Sawangan yang memiliki penduduk sebanyak 123.356 jiwa dengan kepadatan 4.721 jiwa /km².

Tabel 4.5 Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, dan Kepadatan Penduduk Kota Depok Menurut Kecamatan, 2010

No	Kecamatan	Luas (km ²)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)
1	Sawangan	26,13	123.356	4.721
2	Bojongsari	19,56	99.768	5.101
3	Pancoran Mas	18,17	210.204	11.568
4	Cipayung	11,66	127.707	10.953
5	Sukmajaya	17,99	232.895	12.945
6	Cilodong	16,14	123.712	7.666
7	Cimanggis	21,30	242.214	11.374
8	Tapos	32,24	216.581	6.717
9	Beji	14,30	164.682	11.516
10	Limo	12,12	87.615	7.226
11	Cinere	10,68	107.830	10.101
Total		20.504,54	1.736.564	10.101

Sumber: BPS Kota Depok (2010)

4.9 Sosial Ekonomi Kota Depok

1. Tenaga Kerja

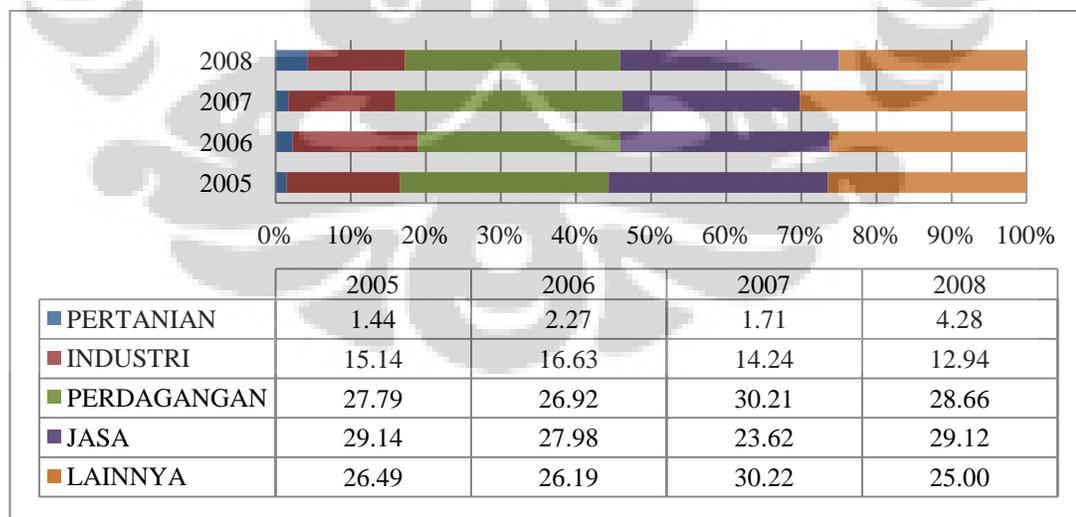
Pada tahun 2010 menurut data Kota Depok Dalam Angka 2010, tercatat sekitar 653.171 penduduk Kota Depok yang berumur 15 tahun ke atas memiliki pekerjaan utama berupa berusaha sendiri, berusaha dengan dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, berusaha dibantu oleh buruh tetap/buruh yang dibayar, buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas di bidang pertanian, pekerja bebas di bidang selain pertanian, serta sebagai pekerja tidak dibayar. Penduduk dengan pekerjaan utama buruh, karyawan, dan pegawai memiliki jumlah terbanyak, yaitu sebanyak 393.278 jiwa dari atau sekitar 60,21% dari keseluruhan penduduk yang tercatat memiliki pekerjaan sebanyak 653.171 jiwa (lihat Tabel 4.6).

Tabel 4.6 Penduduk Usia 15 Tahun ke atas Kota Depok Menurut Status Pekerjaan, 2010

No	Status Pekerjaan	Jumlah (jiwa)	Presentase (%)
1	Berusaha sendiri	133.825	20,49
2	Berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar	52.565	8,05
3	Berusaha dibantu buruh tetap/dibayar	30.789	4,71
4	Buruh/karyawan/pegawai	393.278	60,21
5	Pekerja bebas di pertanian	2.589	0,40
6	Pekerja bebas di non pertanian	15.568	2,38
7	Pekerja tidak dibayar	24.557	3,76
Total		653.171	100,00

Sumber: BPS Kota Depok (2010)

Sementara itu dilihat dari lapangan usaha yang digelutinya, dari tahun 2005 sampai tahun 2008 lapangan usaha berupa perdagangan dan jasa merupakan lapangan usaha paling banyak yang digeluti penduduk Kota Depok, dimana pada tahun 2008 penduduk yang bekerja pada lapangan usaha perdagangan jumlahnya sekitar 28,66 persen dan lapangan usaha jasa sekitar 29,12%. Sementara itu sektor pertanian merupakan sektor yang menampung tenaga kerja dengan presentase hanya berkisar antara 1-4% dari tahun 2005 sampai tahun 2008 (lihat Gambar 4.6).

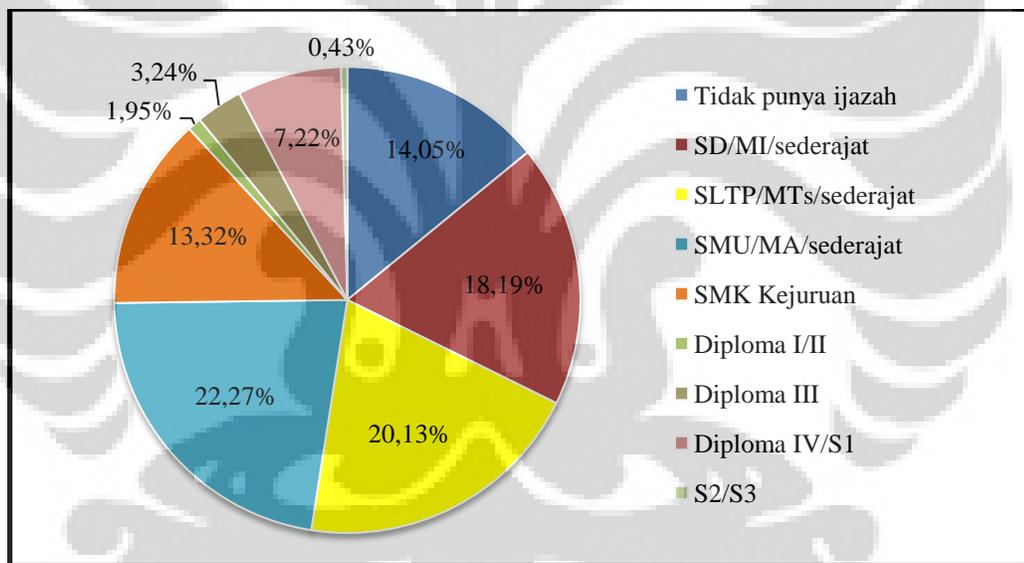


Gambar 4.4 Persentase Penduduk Kota Depok Menurut Lapangan Usaha

sumber: Bappeda Kota Depok (2011)

2. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang penting dalam mendukung kemajuan dan perkembangan suatu daerah. Dari data Kota Depok Dalam Angka 2010 tercatat bahwa tingkat pendidikan penduduk Kota Depok masih rendah, dimana rata-rata penduduk memiliki ijazah dibawah jenjang pendidikan SMU/MA/SMK/ sederajat. Ijazah paling banyak yang dimiliki oleh penduduk Kota Depok usia 10 tahun ke atas adalah ijazah SMU/MA/ sederajat yaitu sekitar 22,27% dari keseluruhan penduduk yang ada di Kota Depok. Penduduk yang tidak punya ijazah atau dengan kata lain tidak mengenyam pendidikan atau tidak menyelesaikan jenjang pendidikan sekolah dasar masih cukup banyak, yaitu sekitar 14,05% dari keseluruhan jumlah penduduk yang ada di Kota Depok (lihat Gambar 4.7).



Gambar 4.5 Persentase Ijazah Terakhir Penduduk Usia 10 tahun ke atas
sumber: Hasil pengolahan data Kota Depok Dalam Angka 2010 (2012)

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Permukiman Kumuh di Kota Depok

5.1.1 Permukiman Kumuh Hasil Identifikasi Citra Quickbird, 2010

Dari hasil interpretasi Citra Quickbird Kota Depok tahun 2010 dengan menggunakan indikator-indikator pada Tabel 3.1 teridentifikasi sebanyak 61 area permukiman kumuh di Kota Depok yang tersebar di seluruh kecamatan dengan 23 kelurahan (lihat Tabel 5.1 dan Peta 6). Kelurahan Kemiri Muka dan Pengasinan merupakan kelurahan-kelurahan dengan jumlah area permukiman kumuh terbanyak, yaitu masing-masing memiliki sebanyak 5 area permukiman kumuh.

Permukiman-permukiman kumuh yang diperoleh dari hasil identifikasi menggunakan Citra Quickbird ini memiliki luas 633,92 ha atau sekitar 8,21% dari total luas permukiman yang ada di Kota Depok. Kelurahan Bojong Pondok Terong, Kecamatan Cipayung merupakan kelurahan dengan luasan wilayah yang teridentifikasi sebagai permukiman kumuh terluas, yaitu seluas 74,65 ha atau sekitar 11,78% dari total luas permukiman kumuh yang teridentifikasi dari hasil interpretasi Citra Quickbird Kota Depok tahun 2010 ini. Sementara itu, Kelurahan Cimpaeun, Kecamatan Tapos memiliki luasan permukiman kumuh terkecil, yaitu seluas 1,84 ha atau sekitar 0,29% dari keseluruhan luas permukiman kumuh yang teridentifikasi dari hasil interpretasi.

Tabel 5.1 Lokasi Permukiman Kumuh Hasil Identifikasi Citra Quickbird (2010) di Kota Depok

No	Kecamatan	Kelurahan	Jumlah (area)	Luas (ha)
1	Beji	Kemiri Muka	5	51,10
2	Bojongsari	Bojongsari	3	24,50
		Bojongsari Baru	3	14,14
3	Cinere	Cinere	2	44,06
		Gandul	2	30,06
4	Cilodong	Kalibaru	1	11,19
5	Cimanggis	Curug	3	41,68
6	Cipayung	Bojong Pondok Terong	4	74,65
		Ratu Jaya	2	27,44
7	Limo	Grogol	2	37,80
		Limo	3	27,43
8	Pancoran Mas	Depok	4	41,02
9	Sawangan	Pengasinan	5	9,22
		Sawangan	2	26,34
		Sawangan Baru	1	26,34
10	Sukmajaya	Abadijaya	3	22,38
		Baktijaya	1	14,44
		Cisalak	1	21,38
11	Tapos	Cilangkap	3	29,73
		Sukamaju Baru	4	34,17
		Tapos	3	23,02
		Cimpaeun	1	1,84
Total			61	633,92

Sumber: Hasil pengolahan data (2012)

5.1.2 Permukiman Kumuh Hasil Verifikasi Lapang

Dari hasil verifikasi lapang terhadap area-area yang teridentifikasi sebagai permukiman kumuh dari hasil interpretasi Citra Quickbird Kota Depok tahun 2010 dengan menggunakan indikator-indikator pada Tabel 3.2, diperoleh sebanyak 51 area permukiman benar-benar kumuh dengan total luas 1.323.953,61 m² atau 132,39 ha

dengan presentase luas sekitar 1,72% dari total luas permukiman yang ada di Kota Depok. Permukiman-permukiman kumuh tersebut tersebar di 14 kelurahan, yaitu Kelurahan Depok, Depok Jaya, Sukamaju Baru, Baktijaya, Sawangan Baru, Sawangan, Bojong Pondok Terong, Abadijaya, Pengasinan, Kemiri Muka, Cinere, Gandul, Pangkalan Jati, dan Kelurahan Limo (lihat Peta 7).

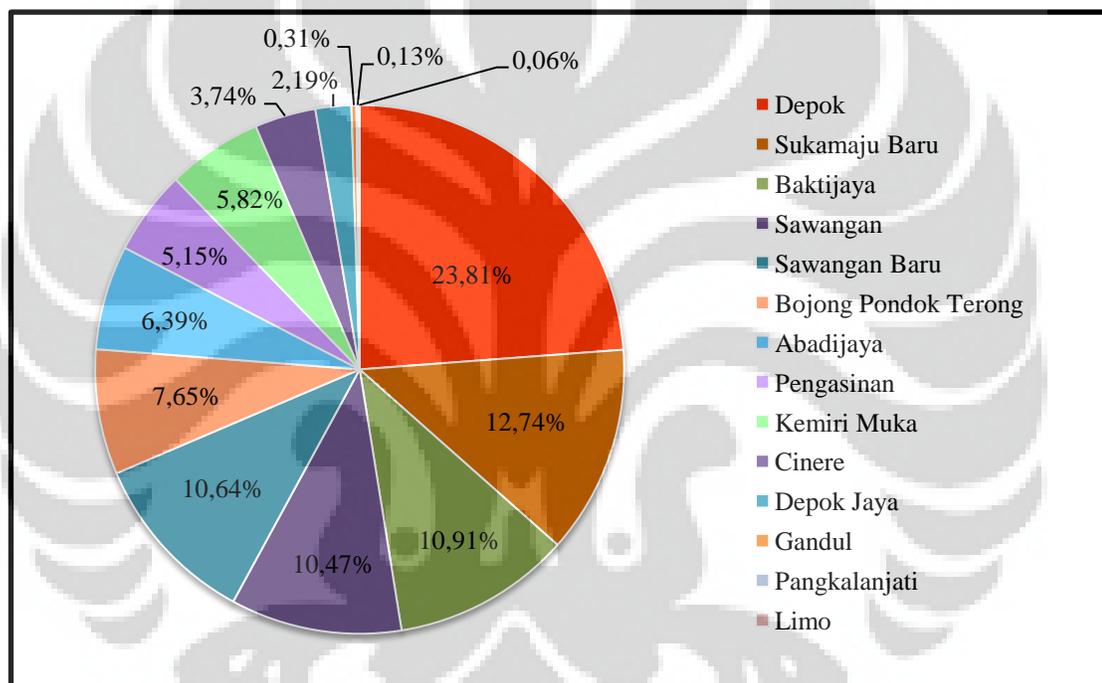
Kelurahan Kemiri Muka, Kecamatan Beji merupakan kelurahan dengan jumlah permukiman kumuh terbanyak, yaitu sebanyak 11 area permukiman kumuh. Sementara itu Kelurahan Limo, Baktijaya, Sawangan Baru, dan Pangkalan Jati merupakan kelurahan-kelurahan yang memiliki permukiman kumuh dengan jumlah paling sedikit, dimana masing-masing kelurahan hanya memiliki satu area permukiman kumuh (lihat Tabel 5.2).

Tabel 5.2 Luasan Permukiman Kumuh di Kota Depok

No	Kelurahan	Jumlah (area)	Luas (m ²)
1	Depok	9	315.239,71
2	Depok Jaya	2	28.949,42
3	Sukamaju Baru	3	168.717,74
4	Baktijaya	1	144.430,02
5	Sawangan Baru	1	138.637,74
6	Sawangan	3	140.837,66
7	Bojong Pondok Terong	5	101.303,64
8	Abadijaya	2	84.588,72
9	Pengasinan	4	68.191,82
10	Kemiri Muka	11	76.988,59
11	Cinere	4	49.454,95
12	Gandul	4	4.070,08
13	Pangkalan Jati	1	1.726,62
14	Limo	1	816,90
Total		51	1.323.953,61

Sumber: Hasil pengolahan data (2012)

Di Kelurahan Depok terdapat permukiman-permukiman kumuh dengan total luas paling luas dibandingkan total luas permukiman kumuh di kelurahan lain, yaitu sebesar 315.239,71 m² atau mencapai 23,81% dari total luas permukiman kumuh yang ada di Kota Depok. Kelurahan Sukamaju baru memiliki permukiman kumuh dengan luasan kedua terluas, yaitu sebesar 12,74% dari keseluruhan permukiman kumuh yang ada (lihat Gambar 5.1). Sementara itu Kelurahan Limo memiliki permukiman kumuh dengan luas terkecil, yaitu seluas 816,90 m² atau hanya sekitar 0,06% dari total luas permukiman kumuh yang ada.



Gambar 5.1 Grafik Presentase Luasan Permukiman Kumuh Masing-masing Kelurahan di Kota Depok

Sumber: Hasil pengolahan data (2012)

5.2 Karakteristik Lokasi Permukiman Kumuh di Kota Depok

5.2.1 Permukiman Kumuh dengan Jarak dari Badan Air

Permukiman Kumuh di Kota Depok banyak tersebar pada area dengan jarak dekat dari badan air, yaitu pada area yang berjarak kurang dari 15 meter dari

sungai atau pada area yang berjarak kurang dari 50 meter dari situ. Sebanyak 30 area permukiman kumuh dengan luas 727.159,82 m² (lihat Tabel 5.3) atau sekitar 54,92% dari total luas permukiman kumuh yang ada berada dekat dengan badan air. Permukiman-permukiman kumuh yang berada dekat dengan badan air ini antara lain dapat ditemui di Kelurahan Cinere, Gandul, Limo, Kemiri Muka, Depok, Depok Jaya, Bojong Pondok Terong, Sawangan, Sawangan Baru, Pengasinan, Baktijaya, Pangkalan Jati, dan Kelurahan Sukamaju Baru.

Permukiman kumuh yang berada pada area berjarak sedang dari badan air, yaitu pada area dengan jarak antara 15 sampai 50 meter dari sungai dan 50 sampai 75 meter dari situ berjumlah 5 area permukiman kumuh dengan luas sekitar 217.331,23 m² atau 16,42% dari total luas permukiman kumuh yang ada. Permukiman-permukiman kumuh yang berlokasi pada area dengan jarak sedang dari situ ini dapat di temui di Kelurahan Depok dan Pengasinan.

Sementara itu permukiman kumuh yang berlokasi pada area dengan jarak jauh dari badan air, yaitu pada area dengan jarak lebih dari 50 meter dari sungai dan pada area yang berjarak lebih dari 75 meter dari situ memiliki luas 379.462,56 m² atau sekitar 28,66% dari total luas permukiman kumuh yang ada. Permukiman-permukiman kumuh yang berlokasi pada area dengan jarak jauh dari badan air ini dapat dijumpai di Kelurahan Bojong Pondok Terong, Sawangan, Pengasinan, Depok, Cinere, Abadijaya, dan Sukamaju Baru.

Tabel 5.3 Jumlah dan Luas Permukiman Kumuh Berdasarkan Jarak dari Badan Air

No	Jarak dari Badan Air	Jumlah (area)	Luas (m ²)
1	Jauh	16	379.462,56
2	Sedang	5	217.331,23
3	Dekat	30	727.159,82
Total		51	1.323.953,61

Sumber: Hasil pengolahan data (2012)

5.2.2 Permukiman Kumuh dengan Jarak dari Rel Kereta Api

Sebagian besar permukiman kumuh yang ada di Kota Depok berlokasi pada area yang berjarak jauh dari rel kereta api, yaitu pada area dengan jarak lebih dari 100 meter dari rel kereta api dengan jumlah sebanyak 38 area permukiman kumuh dari 51 area permukiman kumuh yang ada. Permukiman kumuh yang berlokasi pada area dengan jarak jauh dari rel kereta api ini memiliki luas 985.066,27 m² (lihat Tabel 5.4) atau sekitar 74,40% dari luas total permukiman kumuh yang ada.

Permukiman kumuh dengan jarak sedang dari rel kereta api memiliki luas 222.638,06 atau sekitar 16,82% dari total luas permukiman kumuh yang ada. permukiman kumuh dengan jarak sedang dari rel kereta api ini merupakan area yang berlokasi pada area dengan jarak 20 sampai 100 meter dari rel kereta api. Permukiman-permukiman kumuh yang berlokasi pada area dengan jarak sedang dari rel Kereta api dapat dijumpai di Kelurahan Kemiri Muka dan Depok.

Sementara itu permukiman kumuh yang berlokasi pada area dengan jarak dekat dari rel kereta api (kurang dari 20 meter dari rel kereta api) memiliki luas 116.249,27 m² atau sekitar 8,78% dari total luas permukiman kumuh yang ada. Permukiman kumuh yang berada pada area dengan jarak dekat dari rel kereta api ini dapat ditemui di kelurahan Kemiri Muka, Depok, dan Bojong Pondok Terong.

Tabel 5.4 Jumlah dan Luas Permukiman Kumuh Berdasarkan Jarak dari Rel Kereta Api

No	Jarak dari Rel Kereta Api	Jumlah (area)	Luas (m ²)
1	Jauh	38	985.066,27
2	Sedang	6	222.638,06
3	Dekat	7	116.249,27
Total		51	1.323.953,61

Sumber: Hasil pengolahan data (2012)

5.2.3 Permukiman Kumuh dengan Jarak dari Pusat Ekonomi

Lokasi-lokasi yang berada dekat dengan pusat ekonomi biasanya merupakan lokasi yang banyak dipilih sebagai tempat untuk bermukim, baik karena ketersediaan sarannya yang lengkap maupun karena alasan jarak tempuh yang dekat dengan lokasi-lokasi pusat-pusat aktivitas ekonomi tersebut sehingga memungkinkan untuk melakukan penghematan biaya transportasi menuju tempat bekerja.

Permukiman-permukiman kumuh di Kota Depok sebagian besar berada dekat dengan pusat ekonomi (berjarak kurang dari 0,5 km dari pusat-pusat aktivitas ekonomi), baik pusat ekonomi berupa area perdagangan dan jasa, perkantoran dan jasa, CBD, maupun industri. Sebanyak 40 area permukiman kumuh dengan luas 62.529,45 m² (lihat Tabel 5.5) berlokasi dekat dengan pusat ekonomi. Permukiman-permukiman kumuh yang berlokasi pada area dengan jarak dekat dari pusat-pusat ekonomi ini dapat ditemui di Kelurahan Depok, Depok Jaya, Kemiri Muka, Bojong Pondok Terong, Cinere, Sukamaju Baru, Abadijaya, Pangkalan Jati, Limo, dan Kelurahan Baktijaya.

Sementara itu 5 area permukiman kumuh dengan luas 300.212,68 m² berlokasi pada area yang berjarak sedang (0,5 sampai 1 km) dari pusat ekonomi dan 6 area permukiman kumuh lainnya dengan luas 62.529,45 m² berlokasi pada area yang berjarak jauh dari pusat ekonomi. Permukiman-permukiman kumuh yang berlokasi pada area dengan jarak sedang dari pusat ekonomi dapat ditemui di Kelurahan, Cinere, Gandul, Bojong Pondok Terong, dan Kelurahan Abadijaya. Sedang permukiman kumuh yang berlokasi pada area dengan jarak jauh dari pusat ekonomi berada di Kelurahan Sawangan, Sawangan Baru, dan Pengasinan.

Tabel 5.5 Jumlah dan Luas Permukiman Kumuh Berdasarkan Jarak dari Pusat Ekonomi

No	Jarak dari Pusat Ekonomi	Jumlah (area)	Luas (m ²)
1	Jauh	6	961.211,48
2	Sedang	5	300.212,68
3	Dekat	40	62.529,45
Total		51	1.323.953,61

Sumber: Hasil pengolahan data (2012)

5.2.4 Tipologi Permukiman Kumuh di Kota Depok

Berdasarkan tipologinya menurut (Saraswati, 2000) permukiman kumuh dapat dikelompokkan atas 2 tipologi utama, yaitu *Slum* dan *Squatter* (Auliannis, 2009). Permukiman-permukiman kumuh di Kota Depok memiliki kedua tipologi ini. Permukiman kumuh *squatter* memiliki luas 16.534,34 m² (lihat Tabel 5.6) dengan jumlah 9 area atau sekitar 17,65% dari keseluruhan jumlah permukiman kumuh yang ada di Kota Depok (lihat Gambar 5.2). Permukiman kumuh dengan tipologi *squatter* ini dapat dijumpai di 9 lokasi yaitu di Kelurahan Cinere (di pinggir Sungai Grogol), Kelurahan Gandul (di pinggir Sungai Grogol), Limo (di pinggir Sungai Grogol), Kelurahan Depok (di tanah kosong milik PT KA dan di pinggir Situ Rawa Besar), Depok Jaya (pinggir Situ Rawa Besar), serta di Kelurahan Kemiri Muka (di tanah Kosong milik PT KA di sepanjang rel kereta api) (lihat Peta 12).

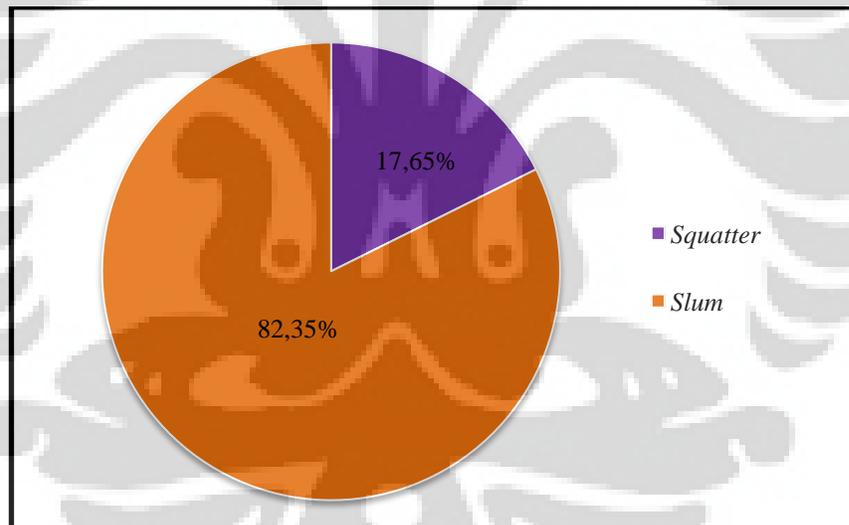
Sementara itu permukiman-permukiman kumuh dengan tipologi *slum* merupakan permukiman-permukiman yang berada pada lokasi-lokasi yang sesuai dengan peruntukan ruang Kota Depok namun terlihat kumuh. Kekumuhan permukiman kumuh dengan tipologi *slum* ini terjadi baik karena penuaan bangunan, kerusakan bangunan karena tidak terawat dengan baik, kondisi permukiman yang berdesak-desakan atau padat, maupun permukiman-permukiman di wilayah kota yang sedikit pedalaman dengan penduduk asli yang kumuh akibat kemiskinan penghuninya yang tidak memiliki kemampuan untuk memperbaharui

rumah-rumah yang mereka tempati. Permukiman-permukiman kumuh dengan tipologi *slum* di Kota Depok ini memiliki luasan sekitar 1.307.419,27 m² dengan jumlah sebanyak 42 area atau 82,35% dari keseluruhan jumlah area permukiman kumuh Kota Depok. Permukiman kumuh dengan tipologi *slum* ini dapat dijumpai di Kelurahan Cinere, Pangkalan Jati, Gandul, Sawangan, Sawangan Baru, Pengasinan, Depok, Bojong Pondok Terong, Abadijaya, Baktijaya, Kemiri Muka, dan Kelurahan Sukamaju Baru.

Tabel 5.6 Luas dan Presentase Permukiman Kumuh Menurut Tipologinya

No	Tipologi	Jumlah (area)	Luas (m ²)
1	<i>Squatter</i>	9	1.307.419,27
2	<i>Slum</i>	42	16.534,34
Total		51	1.323.953,61

Sumber: Hasil pengolahan data (2012)



Gambar 5.2 Grafik Persentase Perbandingan Jumlah Permukiman Kumuh Berdasarkan Tipologinya

Sumber: Hasil pengolahan data (2012)

5.3 Karakteristik Permukiman Kumuh di Kota Depok

5.3.1 Jarak antar Bangunan

Permukiman kumuh dengan jarak antar bangunan kurang dari 1 meter memiliki luasan paling luas, yaitu sekitar 875.961,42 m² atau 87,60 ha yang meliputi 66,16% dari keseluruhan total luas permukiman kumuh yang ada. Permukiman kumuh dengan rata-rata jarak antar bangunan kurang dari 1 meter ini berjumlah 40 permukiman yang dapat ditemui di Kelurahan Cinere, Gandul, Limo, Depok, Baktijaya, Kemiri Muka, Bojong Pndok Terong, dan Sukamaju Baru.

Permukiman kumuh dengan jarak antar bangunan antara 1 sampai 2 m memiliki luas 379.800,37 m² atau sekitar 37,98 ha dengan presentase 28,69% dari total luas permukiman kumuh yang ada. Permukiman-permukiman kumuh dengan jarak rata-rata antar bangunan antara 1 sampai 2 meter berjumlah 7 permukiman yang terdapat di Kelurahan Cinere, Sawangan baru, Sawangan dan Abadijaya.

Permukiman kumuh dengan sebagian besar bangunan berjarak lebih dari 2 m memiliki luas sekitar 68.191,82 m² atau 6,82 ha dengan presentase 5,15% dari total luas permukiman kumuh yang ada (lihat Tabel 5.7). Permukiman kumuh dengan jarak rata-rata antar bangunan lebih dari 2 meter ini dapat dijumpai di Kelurahan Pengasinan dengan jumlah sebanyak 4 area permukiman.

Tabel 5.7 Luas dan Presentase Permukiman Kumuh di Kota Depok Berdasarkan Jarak antar Bangunan

No	Jarak Antar Bangunan	Jumlah (area)	Luas (m ²)	Presentase (%)
1	Sebagian besar berjarak >2 m	4	68.191,82	5,15
2	Sebagian besar berjarak 1 - 2	7	379.800,37	28,69
3	Sebagian besar berjarak <1 m	40	875.961,42	66,16
Total		51	1.323.953,61	100,00

Sumber: Hasil pengolahan data (2012)

5.3.2 Kondisi Jalan Lingkungan

Dari keseluruhan jumlah area permukiman kumuh yang ada di Kota Depok sebanyak 46 area permukiman kumuh memiliki jalan lingkungan dengan kondisi lebih dari 50% jalan lingkungan merupakan jalan/lorong yang diperkeras dengan semen. Hanya 1 area Permukiman kumuh di Kota Depok yang memiliki lebih dari 50% jalan lingkungan berupa jalan aspal atau jalan semen dengan lebar lebih dari 2 m dengan luas 15.736,25 m² atau sekitar 1,19% dari total luas permukiman kumuh yang ada di Kota Depok. Sementara itu Permukiman kumuh dengan kondisi jalan lingkungan masih berupa tanah berjumlah sebanyak 4 area permukiman kumuh dengan total luas sekitar 68.191,82 m² yang meliputi sekitar 5,15% dari total luas wilayah permukiman kumuh yang ada (lihat Tabel 5.8).

Permukiman kumuh dengan jalan aspal atau jalan diperkeras dengan semen yang memiliki lebar lebih dari 2 m terdapat di Kelurahan Cinere. Permukiman kumuh dengan kondisi jalan lingkungan berupa lorong/jalan yang diperkeras dengan semen atau batu ada terdapat sebanyak 45 lokasi tersebar di Kelurahan Depok, Kemiri Muka, Abadijaya, Sawangan, Sawangan Baru, Bojong Pondok Terong, dan Sukamaju Baru. Sedangkan permukiman kumuh dengan jalan lingkungan berupa jalan tanah dapat ditemukan di Kelurahan Pengasinan.

Tabel 5.8 Luas dan Presentase Permukiman Kumuh di Kota Depok Berdasarkan Kondisi Jalan Lingkungan

No	Jalan Lingkungan	Jumlah (area)	Luas (m ²)	Presentase (%)
1	>50% jalan aspal	1	15.736,25	1,19
2	>50% jalan/lorong yang diperkeras dengan semen atau batu	46	1.240.025,54	93,66
3	>50% jalan tanah	4	68.191,82	5,15
Total		51	1.323.953,61	100,00

Sumber: Hasil pengolahan data (2012)



(a) jalan tanah

(b) lorong semen

(c) jalan aspal

Gambar 5.3 Jalan Lingkungan Permukiman Kumuh

Sumber: Dokumentasi pribadi (2012)

5.3.3 Kondisi Bangunan

Permukiman Kumuh di Kota Depok dengan kondisi lebih dari 50% bangunan permanen berjumlah sebanyak 20 area permukiman kumuh dengan luas total 891.533,40 m² atau 67,34% dibandingkan dengan luas keseluruhan permukiman kumuh yang ada. Kawasan permukiman kumuh dengan kondisi bangunan semipermanen berjumlah 15 area dengan luas 30,55% dari total luas permukiman kumuh yang ada. Selanjutnya permukiman kumuh dengan kondisi bangunan darurat berjumlah 16 area dengan paling kecil, yaitu hanya sebesar 2,11% dari total luas wilayah permukiman kumuh (lihat Tabel 5.9).

Tabel 5.9 Luas dan Presentase Permukiman Kumuh di Kota Depok Berdasarkan Kondisi Bangunan

No	Kondisi Bangunan	Jumlah (area)	Luas (m ²)	Presentase (%)
1	>50% permanen	20	891.533,40	67,34
2	>50% semipermanen	15	404.458,19	30,55
3	>50% darurat	16	27.962,02	2,11
Total		51	1.323.953,61	100,00

Sumber: Hasil pengolahan data (2012)

Permukiman kumuh dengan kondisi bangunan darurat merupakan permukiman kumuh dengan bahan bangunan seadanya yang dapat ditemukan di Kelurahan Cinere, Gandul, Limo, Depok, dan Kemiri Muka. Permukiman kumuh dengan lebih dari 50% bangunan semipermanen dapat ditemukan di Kelurahan

Depok, Pengasinan, Abadijaya, Baktijaya, Kemiri Muka, dan Bojong Pondok Terong.



(a) Bangunan darurat

(b) Bangunan semi permanen

(c) Bangunan permanen

Gambar 5.4 Kondisi bangunan Permukiman Kumuh

Sumber: Dokumentasi Pribadi (2012)

5.3.4 Kondisi Sanitasi

Sebanyak 21 area permukiman kumuh dengan presentase luas sekitar 54,90% dari keseluruhan total luas permukiman kumuh yang ada memiliki lebih dari 50% rumah tangga dengan sanitasi yang memadai. Permukiman kumuh dengan 50–30% rumah tangga memiliki sanitasi memadai berjumlah 9 area dengan presentase luas dibandingkan total luas keseluruhan permukiman kumuh yang ada sebesar 36,39%. Sementara itu sebanyak 21 permukiman kumuh dengan kurang dari 30% rumah tangga memiliki sanitasi memadai dengan luas sekitar 8,71% dibandingkan total luas wilayah permukiman kumuh yang ada (lihat Tabel 5.10).

Permukiman kumuh dengan lebih dari 50% rumah tangga memiliki sanitasi memadai tersebar di Kelurahan Depok, Kemiri Muka, Bojong Pndok Terong, Sukamaju Baru, Pengasinan, dan Abadijaya. Permukiman kumuh dengan hanya 50–30% rumah tangga memiliki sanitasi memadai di Kelurahan Depok, Kemiri Muka, Pengasinan, Pangkalan Jati, dan Bojong Pondok Terong. Sedangkan permukiman kumuh dengan kurang dari 30% rumah tangga memiliki sanitasi memadai dapat dijumpai di Kelurahan Depok, Kemiri Muka, Swangan Baru dan Sawangan.

Tabel 5.10 Luas dan Presentase Permukiman Kumuh Berdasarkan Kondisi Sanitasi

No	Kondisi Sanitasi	Jumlah (area)	Luas (m ²)	Presentase (%)
1	>50% rumah tangga memiliki sanitasi memadai	21	726.843,11	54,90
2	50-30% rumah tangga memiliki sanitasi memadai	9	481.750,37	36,39
3	<30% rumah tangga memiliki sanitasi memadai	21	115.360,13	8,71
Total		51	1.323.953,61	100,00

Sumber: Hasil Pengolahan data (2012)

5.3.5 Kondisi Persampahan

Sebanyak 22 area permukiman kumuh dari total 51 permukiman kumuh yang ada di Kota Depok belum melakukan pengelolaan yang baik terhadap sampah, dimana sampah masih dibuang ke sungai, tanah kosong, atau situ. Selain itu sebanyak 13 permukiman kumuh masih mengelola sampah dengan cara sederhana, yaitu dibakar. Dan sisanya sebanyak 16 permukiman kumuh sudah mengelola sampah dengan baik ataupun membuang sampah ke lokasi pembuangan sampah di lokasi lain yang jauh dari lokasi permukiman (lihat Tabel 5.11).

Tabel 5.11 Luas dan Presentase Permukiman Kumuh Berdasarkan Kondisi Persampahan

No	Kondisi Persampahan	Jumlah (area)	Luas (m ²)	Presentase (%)
1	Diangkut petugas/ke pasar	16	546.102,19	41,25
2	Bakar	13	515.562,02	38,94
3	Sungai/tanah kosong/situ	22	262.289,40	19,81
Total		51	1.323.953,61	100,00

Sumber: Hasil pengolahan data (2012)

Permukiman-permukiman kumuh di Kelurahan Depok, Kemiri Muka, Abadijaya, Cinere, Sukamaju baru merupakan permukiman yang sudah mengelola

sampah dengan baik. Sedang permukiman dengan pengelolaan sampah sederhana dapat ditemui di Kelurahan Depok, Sawangan, Pengasinan, dan Bojong Pondok Terong. Sementara itu permukiman dengan sistem pengelolaan sampah masih buruk dan terdapat banyak tumpukan sampah dapat ditemui di Depok, Sawangan Baru, Gandul, Limo Kemiri Muka, dan Pengasinan.

5.3.6 Sumber Air Bersih

2 dari 51 permukiman kumuh Kota Depok memanfaatkan air dari pdam sebagai sumber air bersih, dengan luas wilayah sekitar 11,25% dari total luas permukiman kumuh yang ada 86,64% permukiman kumuh yang ada di Kota Depok Selain itu sebanyak 13 permukiman kumuh memanfaatkan air dari air tanah dengan penggunaan bersama yang meliputi 2,11% dari total luas permukiman kumuh yang ada. Sedangkan 36 lokasi permukiman kumuh sisanya memanfaatkan air tanah dengan kepemilikan sumur sendiri sebagai sumber air bersih (lihat Tabel 5.12).

Permukiman yang memanfaatkan pdam sebagai sumber air bersih adalah permukiman kumuh yang ada di Kelurahan Baktijaya. Permukiman kumuh yang memanfaatkan air dari lokasi yang terpisah dari tempat tinggal dan merupakan sumber air yang digunakan bersama dapat ditemui di Kelurahan Depok, Gandul, Limo, Pangkalan Jati, dan Cinere. Sedangkan pemanfaatan air tanah sebagai sumber air bersih dapat di temui di semua Kelurahan yang memiliki permukiman kumuh.

Tabel 5.12 Luas dan Presentase Permukiman Kumuh Berdasarkan Sumber Air Bersih yang digunakan

No	Sumber Air Bersih	Jumlah (area)	Luas (m ²)	Presentase (%)
1	Sumber air dari pdam	2	149.010,12	11,25
2	Sumber air minum air tanah	36	1.147.021,12	86,64
3	Sumber lain dengan jarak >7 m dari tempat tinggal/bersama	13	27.922,37	2,11
Total		51	1.323.953,61	100,00

Sumber: Hasil pengolahan data (2012)

5.3.7 Kondisi Saluran Limbah

Permukiman kumuh yang telah menggunakan septic tank sebagai tempat pembuangan limbah terdapat di 16 lokasi yang meliputi Kelurahan Pengasinan, Sukamaju Baru, Abadijaya, Sawangan Baru, Sawangan, Kemiri Muka, dan Cinere. permukiman kumuh dengan sarana pembuangan limbah sudah septic tank ini memiliki luas sekitar 48,76% dari total luas permukiman kumuh yang ada (lihat Tabel 5.13).

Permukiman kumuh yang memanfaatkan got atau paralon yang disalurkan ke situ/sungai sebagai tempat pembuangan limbah terdapat di 19 lokasi yang meliputi Kelurahan Bojong Pondok Terong, Pengasinan, Depok, Baktijaya, dan Kemiri Muka. Sedangkan permukiman kumuh yang tidak memiliki sarana pembuangan limbah terdapat di Kelurahan Cinere, Gandul, Limo, dan Depok.

Tabel 5.13 Luas dan Presentase Permukiman Kumuh Berdasarkan Kondisi Saluran Limbah

No	Saluran Limbah	Jumlah (area)	Luas (m ²)	Presentase (%)
1	Septic tank	16	645.600,11	48,76
2	Saluran ke situ/sungai	19	647.976,29	48,94
3	Tanpa saluran	16	30.377,20	2,29
Total		51	1.323.953,61	100,00

Sumber: Hasil pengolahan data (2012)

5.4 Karakteristik Sosial Ekonomi Permukiman Kumuh di Kota Depok

5.4.1 Status Kependudukan

Kota Depok sebagai kota yang sedang berkembang memiliki daya tarik tersendiri bagi para pendatang sebagai tempat bermukim. Namun demikian, biaya cukup mahal yang harus dikeluarkan untuk dapat memiliki atau menyewa rumah dengan kondisi layak huni di Kota Depok membuat para penduduk pendatang ini terpaksa bermukim di tempat-tempat yang kondisinya jauh dari kata layak atau

kumuh. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya penduduk pendatang yang bermukim di permukiman-permukiman kumuh Kota Depok. Sekitar 64,14% penduduk yang bermukim di permukiman-permukiman kumuh yang ada di Kota Depok merupakan penduduk dengan status sebagai penduduk pendatang (lihat Tabel 5.14).

Tabel 5.14 Jumlah dan Presentase Penduduk Permukiman Kumuh Menurut Status Kependudukannya

No	Status Kependudukan	Jumlah (jiwa)	Presentase (%)
1	Pendatang	161	64,14
2	Penduduk asli	90	35,86
Total		251	100,00

Sumber: Pengolahan Data (2012)

5.4.2 Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang berperan penting terhadap perkembangan dan kemajuan suatu daerah. Penduduk yang tinggal di permukiman kumuh Kota Depok sebagian besar menamatkan SMA dengan presentase 31,47% dari keseluruhan jumlah penduduk. Sisanya 27,49% menamatkan 18,73% menamatkan SMP/ sederajat, SD/ sederajat, 16,73% tidak menamatkan SD, dan 5,58% menamatkan perguruan tinggi (lihat Tabel 5.15).

Tabel 5.15 Jumlah dan Presentase Penduduk Permukiman Kumuh Menurut Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah (jiwa)	Presentase (%)
1	Pendidikan Tinggi	14	5,58
2	SMA/ sederajat	79	31,47
3	SMP/ sederajat	69	27,49
4	SD/ sederajat	47	18,73
5	Tidak tamat SD	42	16,73
Total		251	100,00

Sumber: Hasil pengolahan data (2012)

5.4.3 Pekerjaan

Tabel 5.16 Jumlah dan Presentase Penduduk Permukiman Kumuh Menurut Pekerjaan

No	Pekerjaan	Jumlah (jiwa)	Presentase (%)
1	Pengemis/pemulung	48	19,12
2	Pedagang	63	25,10
3	Buruh	69	27,49
4	Pegawai	39	15,54
5	Tidak bekerja	22	8,76
6	Lain-lain	10	3,98
Total		251	100,00

Sumber: hasil pengolahan data (2012)

Secara garis besar pada umumnya penduduk yang tinggal di permukiman-permukiman kumuh Kota Depok bekerja di sektor-sektor informal sebagai pengemis atau pemulung; pedagang keliling atau pedagang di pasar-pasar tradisional yang berada dekat dengan permukiman; serta bekerja sebagai buruh dan pekerja lepas. Sedangkan yang bekerja di sektor formal menjadi pegawai, baik negeri maupun swasta hanya sebagian kecil saja (lihat Tabel 5.16)

5.5 Tingkat Kekumuhan Permukiman Kumuh di Kota Depok

Berdasarkan tingkat kekumuhannya permukiman-permukiman kumuh di Kota Depok terdiri atas permukiman kumuh dengan tingkat kekumuhan berat, sedang, dan ringan (nilai masing-masing indikator tingkat kekumuhan dapat dilihat pada Lampiran Tabel 1) dengan jumlah masing-masing 22, 20, dan 9 area (lihat Tabel 5.17). permukiman kumuh dengan tingkat kekumuhan berat memiliki luasan sekitar 71.475,73 m² yang mencakup 5,40% luas total permukiman kumuh yang ada. Permukiman kumuh dengan tingkat kekumuhan berat ini dapat ditemukan di Kelurahan Kemiri Muka, Depok, Gandul, Cinere, Limo, Pangkalan Jati, dan Bojong Pondok Terong (Peta 8).

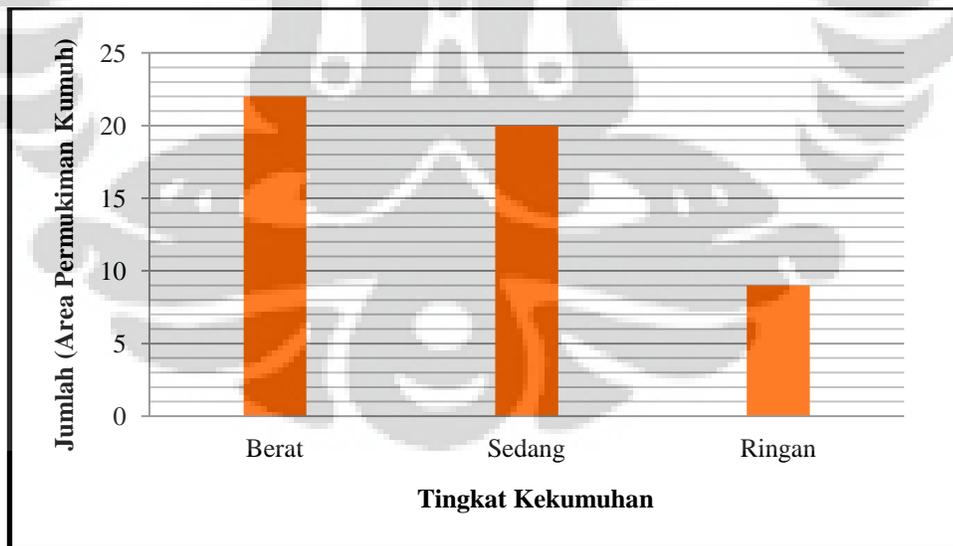
Permukiman kumuh dengan tingkat kekumuhan sedang memiliki luas paling besar, yaitu sekitar 985.455,34 m² dengan presentase 74,43% dari total luas permukiman kumuh yang ada. Permukiman kumuh dengan tingkat kekumuhan sedang ini dapat ditemukan di Kelurahan Depok, Kemiri Muka, Sawangan Baru, Bojong Pondok Terong, Sukamaju Baru, Baktijaya, Pengasinan, dan Cinere (Peta 9).

Sementara itu permukiman kumuh dengan tingkat kekumuhan ringan memiliki luas sekitar 267.022,53 m² dengan presentase 20,17% dari total luas permukiman kumuh yang ada. Permukiman kumuh dengan tingkat kekumuhan ini dapat dijumpai di Kelurahan Abadijaya, Kemiri Muka, Cinere, Pengasinan, dan Sawangan (Peta 10).

Tabel 5.17 Luasan Permukiman Kumuh Berdasarkan Tingkat Kekumuhannya

No	Tingkat Kekumuhan	Jumlah (area)	Luas (m ²)
1	Kumuh berat	22	71.475,73
2	Kumuh sedang	20	985.455,34
3	Kumuh ringan	9	267.022,54
Total		51	1.323.953,61

Sumber: Hasil pengolahan data (2012)



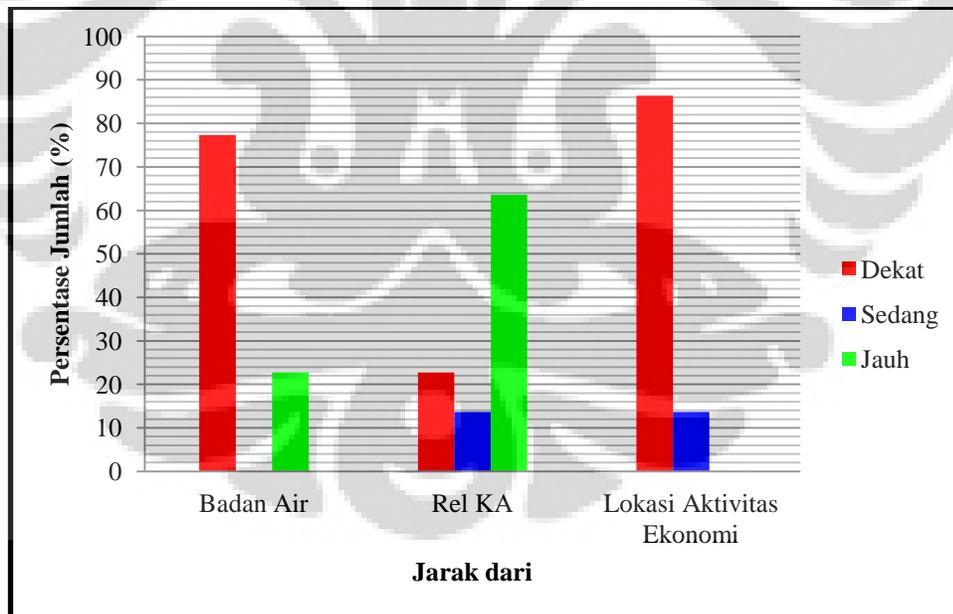
Gambar 5.5 Grafik Jumlah Permukiman Kumuh Berdasarkan Tingkat Kekumuhannya

Sumber: Hasil pengolahan data (2012)

Dilihat dari jumlah masing-masing tingkat kekumuhan terlihat bahwa permukiman kumuh di Kota Depok umumnya kumuh berat, dimana 22 area dari 51 area permukiman kumuh yang ada kumuh berat. Namun demikian permukiman-permukiman kumuh dengan tingkat kekumuhan berat ini memiliki luasan kecil, hanya sekitar 5,40% dibandingkan total luas keseluruhan permukiman kumuh yang ada. Permukiman kumuh sedang memiliki jumlah kedua terbanyak, yaitu sebanyak 20 area dari 51 area permukiman kumuh yang ada. Permukiman kumuh sedang memiliki luasan cukup besar, yaitu mencapai 74,43% dibandingkan luas keseluruhan permukiman kumuh yang ada. Sama halnya dengan permukiman kumuh sedang, permukiman kumuh ringan juga memiliki luasan cukup besar, namun dalam jumlah sedikit, yaitu hanya 9 area dari 51 area yang ada (lihat Tabel 5.17 dan Gambar 5.5).

5.6 Pola Keruangan Permukiman Kumuh di Kota Depok Berdasarkan Tingkat Kekumuhannya

5.6.1 Permukiman Kumuh Berat



Gambar 5.6 Grafik Karakteristik Lokasi Permukiman Kumuh Berat

Sumber: Hasil pengolahan data (2012)

Dilihat dari karakteristik lokasi tempatnya dibangun, permukiman kumuh berat yang ada di Kota Depok dominan berada pada lokasi dengan jarak dekat dari badan air dan lokasi aktivitas ekonomi. Sementara itu dilihat dari jaraknya dari rel kereta api terlihat bahwa permukiman-permukiman kumuh berat yang ada di Kota Depok umumnya berada pada area dengan jarak jauh dari rel kereta api. Area yang berada pada jarak dekat dengan badan air merupakan area-area marjinal yang seharusnya menjadi kawasan resapan air dan tidak boleh dibangun sebagai lokasi permukiman. Namun demikian, kecenderungan permukiman kumuh berat ini berlokasi pada area yang memiliki jarak dekat dari badan air dapat dipahami karena pada area ini dapat ditemukan tanah maupun rumah dengan sewa murah atau bahkan tidak perlu mengeluarkan biaya sewa sepeserpun.

Sesuai dengan pendapat Clinard (1968) bahwa permukiman kumuh dapat terjadi karena kerusakan lingkungan yang dapat disebabkan oleh gangguan yang ditimbulkan oleh manusia seperti gangguan sampah, beberapa lokasi permukiman kumuh berat di Kota Depok menjadi kumuh berat karena berada dekat dengan tumpukan sampah, terutama permukiman kumuh yang dihuni oleh pemulung disekitar tempat pembuangan sampah. Selain itu beberapa permukiman kumuh yang berada dekat dengan badan air juga menjadi kumuh berat terutama karena adanya tumpukan sampah dan pembuangan limbah rumah tangga ke badan air tersebut, baik sungai maupun situ. Hal tersebut senada dengan pendapat yang dikemukakan oleh Yuwono (2003) bahwa pada umumnya masyarakat memandang sungai ataupun situ sebagai tempat untuk membuang barang-barang tidak berguna, membuang limbah rumah tangga.

Tabel 5.18 Kondisi Sosial Ekonomi Penduduk Permukiman Kumuh Berat

No	Indikator	Persentase
1	Pendidikan	
	• Rendah	53,85
	• Sedang	30,77
	• Tinggi	15,38
2	Pekerjaan	
	• Sektor Formal	0,00
	• Sektor Informal	100,00
	• Status Kependudukan	
3	• Penduduk Asli	0,00
	• Penduduk Pendetang	100,00

Sumber: Hasil pengolahan data (2012)

Penduduk yang bermukim di permukiman-permukiman kumuh berat Kota Depok merupakan penduduk pendatang yang sebagian besar berpendidikan rendah dan semuanya bekerja di sektor informal (lihat Tabel 5.18), seperti pemulung, pengemis, pedagang keliling, pedagang di pasar-pasar tradisional, buruh, sopir, tukang becak, dll. Sektor-sektor informal yang menjadi tumpuan kehidupan mereka ini pada umumnya merupakan sektor-sektor informal dengan penghasilan rendah. Keberadaan penduduk pendatang dengan penghasilan rendah ini sesuai dengan pendapat Yunus (2006) yang menyatakan bahwa banyaknya penduduk pendatang yang datang ke kota dengan modal pendidikan rendah yang membuat mereka hanya dapat tertampung di sektor informal kota menjadi salah satu sebab munculnya permukiman-permukiman kumuh di wilayah perkotaan, baik permukiman kumuh dengan tipologi *slum* maupun *squatter*.

Selain itu Kondisi Sosial ekonomi penduduk permukiman kumuh berat pada masing-masing lokasi umumnya homogen, dimana pada umumnya mereka yang menghuni suatu area permukiman kumuh berat memiliki pekerjaan yang sama dan atau berasal dari daerah yang sama.

Keseluruhan permukiman kumuh *squatter* di Kota Depok merupakan kumuh berat. Dengan penghasilan penduduk yang bermukim di perkumuhan kumuh *squatter* yang rendah, sementara sewa rata-rata rumah layak huni di Kota Depok cukup tinggi, tidak mengherankan jika mereka memilih menempati rumah-rumah yang mereka bangun sendiri secara liar (*squatter*) pada lahan-lahan yang tidak semestinya dijadikan lokasi untuk bermukim atau menyewa tanah ataupun bangunan dengan sewa murah namun memiliki kondisi tidak layak sebagai tempat bermukim. Selain itu, dari segi geografis keberadaan keseluruhan permukiman kumuh *squatter* yang sebagian besar berada di kawasan pinggiran sungai dan rel kereta api sesuai dengan pendapat Saraswati (2000, dalam Aulianis, 2009) yang mengatakan bahwa secara geografis permukiman *squatter* berada pada kawasan bantaran sungai atau area selebar 15 meter di kiri dan kanan sungai serta di sepanjang rel kereta api.

Dengan melihat kondisi sosial dan ekonomi penduduk permukiman kumuh berat ini juga dapat dipahami alasan mengapa kebanyakan permukiman kumuh berat berada dekat dengan badan air dan lokasi aktivitas ekonomi. Pemilihan lokasi sebagai tempat bermukim tersebut mereka lakukan dengan alasan ekonomi, dimana sewa tanah maupun bangunan yang berlokasi dekat dengan badan air umumnya lebih murah dan pemilihan lokasi yang berdekatan dengan lokasi aktivitas ekonomi dilakukan demi menghemat biaya transportasi menuju ke lokasi aktivitas-aktivitas ekonomi Kota Depok yang dapat memberikan kesempatan bagi mereka untuk dapat berusaha mencari nafkah dalam rangka bertahan hidup, hal ini senada dengan pendapat yang dikemukakan oleh Turner (1968, dalam Rindarjono, 2007) yang mengatakan bahwa bagi penduduk dengan penghasilan rendah faktor jarak dari tempat-tempat yang mampu memberikan kesempatan kerja (lokasi-lokasi aktivitas ekonomi menjadi prioritas utama dalam memenuhi kebutuhan akan rumah sedangkan faktor kondisi bangunan menjadi prioritas terakhir yang menjadi pertimbangan bagi mereka dalam memilih rumah.

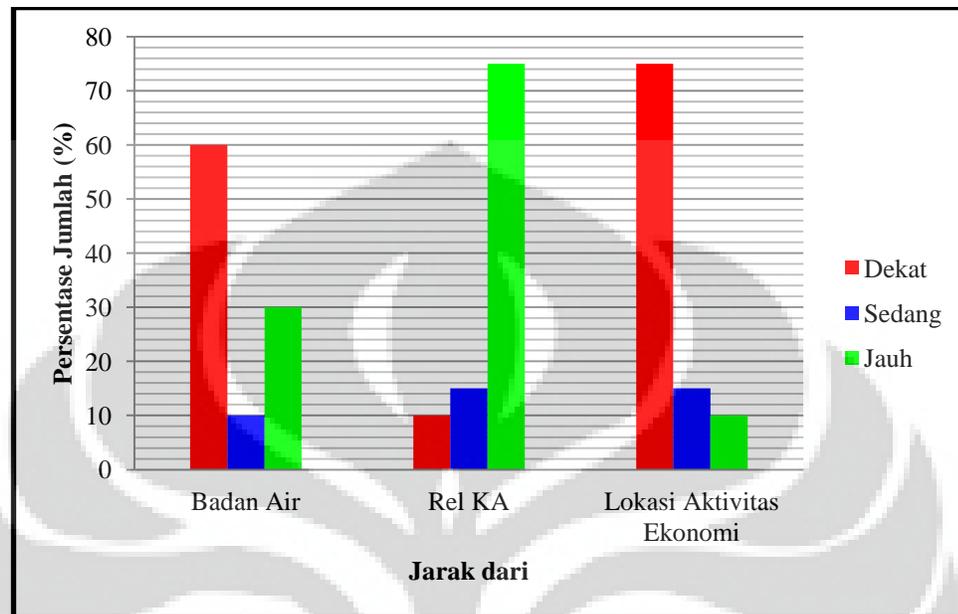
Permukiman kumuh berat dibangun secara ilegal (*squatter*) di Kota Depok, dapat di jumpai di Kelurahan Cinere (di pinggiran Kali Grogol), Gandul (di pinggiran Kali Grogol), Limo (di pinggiran Kali Grogol), Depok (di tanah Kosong milik PT KAI dan pinggiran Situ Rawa Besar), Depok Jaya (di pinggiran situ Rawa Besar), serta di Kelurahan Kemiri Muka (di tanah kosong sepanjang rel kereta api milik PT KAI). Selain menempati tanah secara liar juga ada beberapa dari permukiman kumuh berat ini berdiri di atas tanah-tanah sewaan dengan bangunan mereka bangun sendiri menggunakan bahan seadanya atau bangunan sewaan yang memiliki sewa murah dengan bahan seadanya, seperti menggunakan bahan seng, anyaman bambu, atau triplek sebagai dinding.

Jika ditilik dari proses terbentuknya permukiman kumuh menurut Sutanto (1995, dalam Suharini, 2007), permukiman kumuh berat di Kota Depok merupakan permukiman kumuh bangunan (*created*) yang memiliki ciri sebagai daerah hunian masyarakat ekonomi rendah, bangunan mudah dipindahkan (tidak permanen) dengan bahan seadanya, serta sebagian besar dibangun sendiri oleh penghuni. Permukiman-permukiman kumuh berat di Kota Depok ini pada umumnya memiliki morfologi berupa permukiman kumuh yang berlokasi di sekitar badan air dan di sepanjang rel kereta api, meskipun permukiman kumuh berat yang berada di sepanjang rel kereta pi tidak terlalu banyak.

5.6.2 Permukiman Kumuh Sedang

Sama halnya dengan permukiman kumuh berat, permukiman kumuh sedang sebagian besar berada pada area yang memiliki jarak dekat dari badan air dan lokasi aktifitas ekonomi. Sedangkan dari rel kereta api jaraknya pada umumnya jauh. Kenyataan bahwa permukiman-permukiman kumuh sedang yang sebagian besar berlokasi pada area dengan jarak dekat dari badan air masih relevan dengan pendapat Yuwono (2003) yang mengemukakan bahwa ada kecenderungan masyarakat memandang badan air sebagai tempat pembuangan sehingga

permukiman-permukiman yang berda pada jarak dekat dengan badan air cenderung kumuh.



Gambar 5.7 Grafik Karakteristik Lokasi Permukiman Kumuh Sedang

Sumber: Hasil pengolahan data (2012)

Penduduk yang bermukim di permukiman-permukiman kumuh sedang kota Depok ini sebagian besar merupakan penduduk asli dengan pendidikan dominan sudah memadai, yaitu memiliki pendidikan tinggi (tamatan SMA). Namun demikian mereka umumnya masih menggantungkan hidup pada sektor-sektor formal, terutama menjadi buruh. Sedangkan sebagian kecil lagi merupakan penduduk pendatang yang pada umumnya bekerja di sektor informal sebagai pedagang, baik pedang keliling maupun pedagang di pasar-pasar tradisional yang ada di dekat tempat mereka bermukim. Kondisi sosial ekonomi penduduk yang bermukim di permukiman kumuh sedang sudah lebih heterogen kondisi sosial ekonomi penduduknya dibandingkan permukiman kumuh berat. Namun demikian, permukiman-permukiman sedang yang dihuni oleh penduduk asli masih cenderung homogen kondisi sosial ekonomi penduduknya.

Tabel 5.19 Kondisi Sosial Ekonomi Penduduk Permukiman Kumuh Sedang

No	Indikator	Persentase	
1	Pendidikan		
	• Rendah	30,14	
	• Sedang	23,97	
	• Tinggi	36,30	
	• Sangat Tinggi	9,59	
	2	Pekerjaan	
		• Sektor Formal	17,81
		• Sektor Informal	82,19
3	Status Kependudukan		
	• Penduduk Asli	61,11	
	• Penduduk Pendatang	38,89	

Sumber: Hasil pengolahan data (2012)

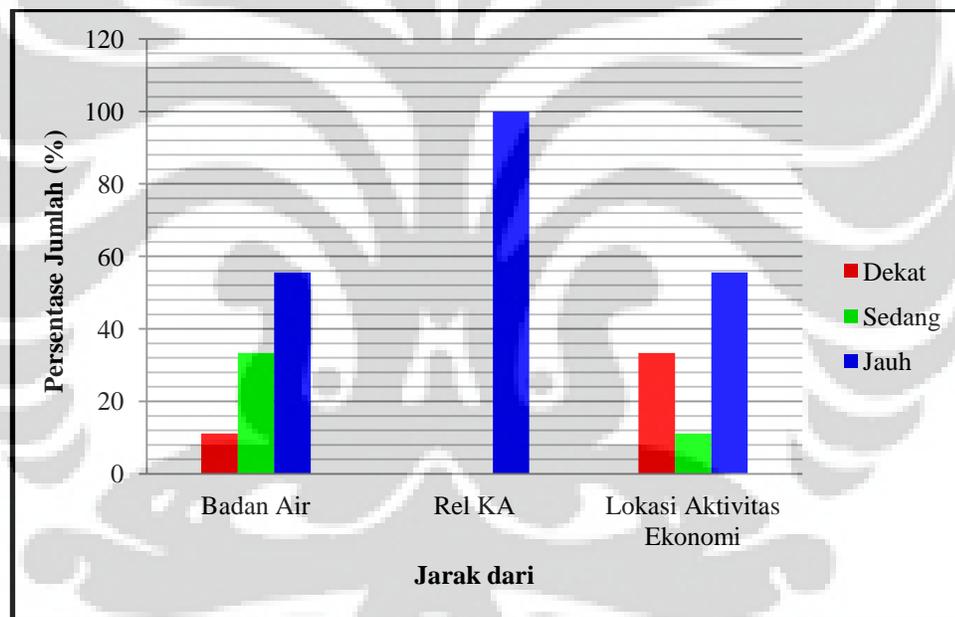
Meskipun permukiman-permukiman kumuh sedang di Kota Depok ini sudah dihuni oleh penduduk dengan pendidikan yang memadai namun pekerjaan mereka yang hanya di sektor informal tetap membuat penghasilan mereka rendah. Bagi penduduk pendatang penghasilan rendah ini membuat mereka tidak mampu untuk memiliki ataupun menyewa rumah dengan kondisi baik yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana memadai sehingga mereka terpaksa menyewa rumah-rumah/kontrakan-kontrakan sempit di kampung-kampung kota yang dari waktu ke waktu semakin sempit dan padat. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Yunus (2006) yang mengatakan bahwa bagi penduduk pendatang yang terpaksa hidup dari kegiatan-kegiatan di sektor informal, untuk dapat memenuhi kebutuhan mereka akan menyewa rumah di bagian-bagian pusat kota yang dekat dengan tempat mereka bekerja sehingga mengakibatkan terjadinya pemadatan bangunan yang tidak terkendali dan mengakibatkan terbentuknya permukiman kumuh (*slum*).

Penduduk berpenghasilan rendah yang identik dengan ketidakmampuan untuk memiliki dan menyewa rumah tidak sepenuhnya berlaku bagi penduduk asli karena penduduk-penduduk asli yang bermukim di permukiman kumuh sedang di Kota

Depok ini pada umumnya memiliki tanah sendiri, baik berupa tanah dengan sertifikat, girik, maupun HGB. Kekumuhan yang dialami oleh penduduk asli ini terjadi karena ketidakcukupan penghasilan yang mereka miliki untuk memperbaiki dan memperbaharui rumah-rumah yang telah mereka miliki sehingga rumah yang mereka diami menjadi rusak dan kumuh.

Keseluruhan permukiman-permukiman kumuh sedang di Kota Depok ini keseluruhannya memiliki tipologi *slum*, baik permukiman kumuh sedang yang dihuni oleh penduduk pendatang yang merupakan pengontrak maupun penduduk asli yang merupakan pemilik.

5.6.3 Permukiman Kumuh Ringan



Gambar 5.8 Grafik Karakteristik Lokasi Permukiman Kumuh Ringan

Sumber: Hasil pengolahan data (2012)

Permukiman kumuh ringan dominan berada pada area yang berlokasi pada jarak jauh dari badan air, rel kereta api, maupun lokasi aktifitas ekonomi. dengan keseluruhan permukiman kumuh ringan ini merupakan *slum*.

Penduduk yang bermukim di permukiman kumuh ringan Kota Depok ini adalah penduduk asli dan penduduk pendatang dengan perbandingan jumlah hampir sama yang sudah memiliki pendidikan memadai dengan tingkat pendidikan tinggi dan sangat tinggi. Sama seperti permukiman-permukiman kumuh berat dan sedang sebagian besar penduduk berusaha di sektor informal.

Tabel 5.20 Kondisi Sosial Ekonomi Penduduk Permukiman Kumuh Ringan

No	Indikator	Persentase
1	Pendidikan	
	• Rendah	25,00
	• Sedang	0,00
	• Tinggi	40,00
2	• Sangat Tinggi	35,00
	Pekerjaan	
	• Sektor Formal	17,50
	• Sektor Informal	82,50
3	Status Kependudukan	
	• Penduduk Asli	52,50
	• Penduduk Pendatang	47,50

Sumber: Hasil pengolahan data (2012)

Meskipun berlokasi pada area dengan jarak rata-rata tidak terlalu jauh (dekat atau sedang) dari lokasi aktivitas ekonomi yang ada di Kota Depok, namun permukiman-permukiman kumuh ringan yang dihuni oleh penduduk asli berada jauh dari pusat Kota Depok, yaitu di Kelurahan Depok. Sedangkan permukiman kumuh ringan yang dihuni oleh penduduk pendatang pada umumnya berada dekat dengan pusat kota. Kondisi permukiman kumuh ringan yang dihuni oleh penduduk pendatang umumnya lebih heterogen dibandingkan permukiman kumuh ringan yang dihuni oleh penduduk asli, baik dari segi pekerjaan penduduknya maupun suku dan daerah asal penduduknya.

BAB VI

KESIMPULAN

Permukiman kumuh berat dan sedang yang ada di Kota Depok pada umumnya berada pada lokasi yang berjarak dekat dengan badan air dan aktifitas ekonomi. Sedangkan permukiman kumuh dengan tingkat kekumuhan ringan pada umumnya berada pada lokasi yang berjarak jauh dari badan air dan aktifitas ekonomi. Sementara itu jika dilihat dari jarak lokasinya terhadap rel kereta api, kedekatan dengan rel kereta api tidak memberikan pengaruh yang terlalu signifikan bagi tingkat kekumuhan permukiman-permukiman kumuh yang ada di Kota Depok tersebut.

Dari segi kondisi sosial-ekonomi penduduknya, walaupun sama-sama dihuni oleh penduduk dengan karakteristik sosial-ekonomi hampir sama, namun ada kecenderungan bahwa kondisi sosial-ekonomi, terutama pendidikan dan pekerjaan penduduk yang bermukim di dalamnya akan semakin baik dan memadai jika semakin ringan kekumuhannya. Selain itu, dari segi status kependudukannya terdapat kecenderungan semakin besar komposisi penduduk pendatang maka semakin berat tingkat kekumuhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsalan, Sakib. (2009). *Permukiman kumuh di Provinsi DKI Jakarta*. Depok: Tesis Program Studi Geografi, Universitas Indonesia.
- Auliannis, Dywangga. (2009). *Permukiman kumuh di Kota Bandung*. Depok: Skripsi Program Studi Geografi, Universitas Indonesia.
- Badan Standarisasi Nasional. (2004). *Tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan*. 27 Januari 2012. <http://oc.its.ac.id/ambilfile.php?idp=1354>.
- Bappeda Kota Depok. (2010). *Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang PU/Cipta Karya Kota Depok 2010-2014*. Depok: Penulis.
- Bappeda Kota Depok. (2011). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok 2011-2016*. Depok: Penulis.
- Bintarto, R. (1983). *Urbanisasi dan permasalahannya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- BPS Kota Depok. (2010). *Kota Depok dalam Angka 2010*. 23 Februari 2012. <http://bappeda.depok.go.id/admin/dokumenProdukstatistik/DDA%20%20BAPPEDA2010.pdf>.
- Clinard, M.B. (1968). *Slums and community development: experiments in Self Help*. New York: The Free Press.
- Dinas Pekerjaan Umum. (n.d). *Direktori istilah bidang pekerjaan umum, badan air*. 13 Juni 2012. <http://pustaka.pu.go.id/new/istilah-bidang-detail.asp?id=18>.
- Dirjen Perumahan dan Permukiman. (2002). *Pengelolaan tanah untuk pembangunan perumahan dan permukiman dalam kerangka penataan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kab/kota*. Makalah lokakarya wewenang pemerintah dalam rangka otonomi daerah, Jakarta.
- Doxiadis, Constantinos A. (1968). *An introduction to the science of human settlements-ekistics*. London: Hutchinson of London.

- Ishtiyah, M., & Kumar, Sunil. (2011). Typology of informal settlements and distribution of slum in the NCT, Delhi. *Jurnal of contemporary India studies: space and society, Hiroshima University*, 1, 37-46.
- Khomarudin. (1997). *Menelusuri pembangunan perumahan dan permukiman*. Jakarta: Yayasan Real Estate Indonesia, PT. Rakasindo.
- Maryani, Enok. (2002). *Pengantar geografi perkotaan*. Bandung: Jurusan Pendidikan Geografi UPI.
- Masjkuri, Siti Umajah. (2007). *Perbaikan kampung komprehensif dan dampaknya terhadap kesejahteraan sosial serta kemandirian masyarakat miskin kampung kumuh di Kota Surabaya*. Surabaya: Program Pascasarjana Universitas Airlangga.
- Munir, Rozy. (2004). *Migrasi*. Dalam Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Dasar-dasar demografi. Depok: Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Panudju, B. (1999). *Pengadaan perumahan kota dengan peran serta masyarakat berpenghasilan rendah*. Bandung: Alumni.
- Rebekka, Yunita. (1991). *Penyebaran permukiman kumuh, Kecamatan Tambora, Tamansari, dan Grogol Petamburan (Jakarta Barat)*. Depok: Skripsi Program Studi Geografi, Universitas Indonesia.
- Rindarjono, Mohammad Gamal. (2007). Residential mobility di pinggiran Kota Semarang, Jawa Tengah (studi kasus kaum miskin di Kota Semarang). *Forum Geografi*. Vol. 21, No. 2: Semarang.
- Rindarjono, Mohammad Gamal. (2010). *Perkembangan permukiman kumuh di Kota Semarang tahun 1980 – 2006*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada. 8 Desember 2011. http://lib.ugm.ac.id/digitasi/upload/1467_RD1005003.pdf.

- Silas, Johan. (1993). *Permukiman kumuh di Jakarta : tinjauan kontradiktif-komparatif*. Jakarta : Masyarakat Jurnal Sosiologi Jurusan Fisiologi FISIP Universitas Indonesia.
- Sinulingga, Budi. (2005). *Pembangunan kota: tinjauan regional dan lokal*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Socki, B.S. (1993). The pontetial of aerial photos for slum and squatter settlement detection and mapping. *Asian Pasific Remote Sensing Journal*. Vol. 5, No 2: Bangkok.
- Suharini, Erni. (2007). Menemukenali agihan permukiman kumuh di perkotaan melalui interpretasi citra penginderaan jauh. *Jurnal Geografi*. Volume 4 No. 2: Semarang.
- Suparlan, Parsudi.(n.d) *Segi ekonomi dan sosial permukiman kumuh*. (Februari 2, 2012).
http://geografi.ums.ac.id/ebook/Social_Education/SOS_NOMI_KUMUH.pdf.
- Surtiani, Eny Endang. (2006). *Faktor-faktor yang mempengaruhi terciptanya permukiman kumuh di kawasan pusat kota*. Semarang: Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
- UN-HABITAT. (2008). *Perumahan bagi kaum miskin di kota-kota Asia* (Wicaksono, Eveline, F.P. Anggriani Arifin, & Savitri R. Soegijoko, penerjemah). Nairobi: Author.
- Warsono, Agus. (2006). *Perkembangan permukiman pinggiran kota pada Koridor Jalan Kaliurang Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman*. Semarang: Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
- Yunus, Hadi Sabari. (2006). *Megapolitan: konsep, problematika, dan prospek*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Yunus, Hadi Sabari. (2010). *Metodologi penelitian wilayah kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.



LAMPIRAN 1**FOTO**

Jalan Tanah di Kel. Pengasinan



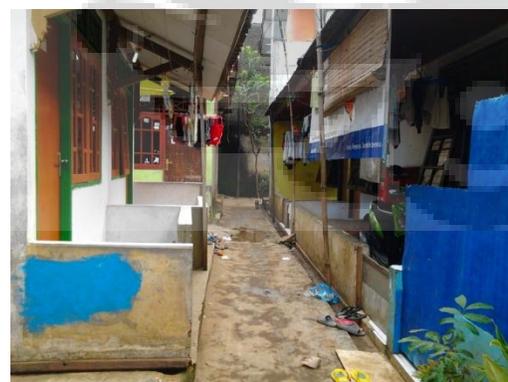
Jalan semen di Kel Kemiri Muka



Jalan aspal di Kel. Sawangan



Kumuh Berat di Kel. Depok



Kumuh Sedang di Kel. Depok



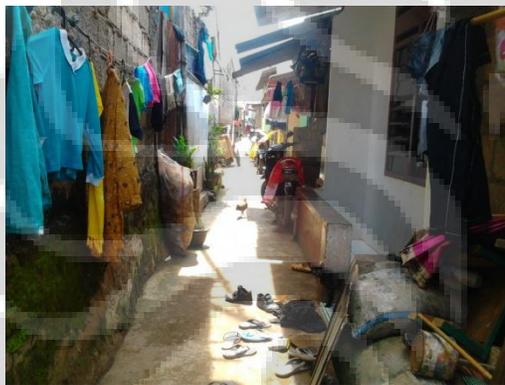
Kumuh Ringan di Kel. Sawangan



Pinggiran situ (Situ Citayam)



Pinggiri sungai (Sungai Grogol)

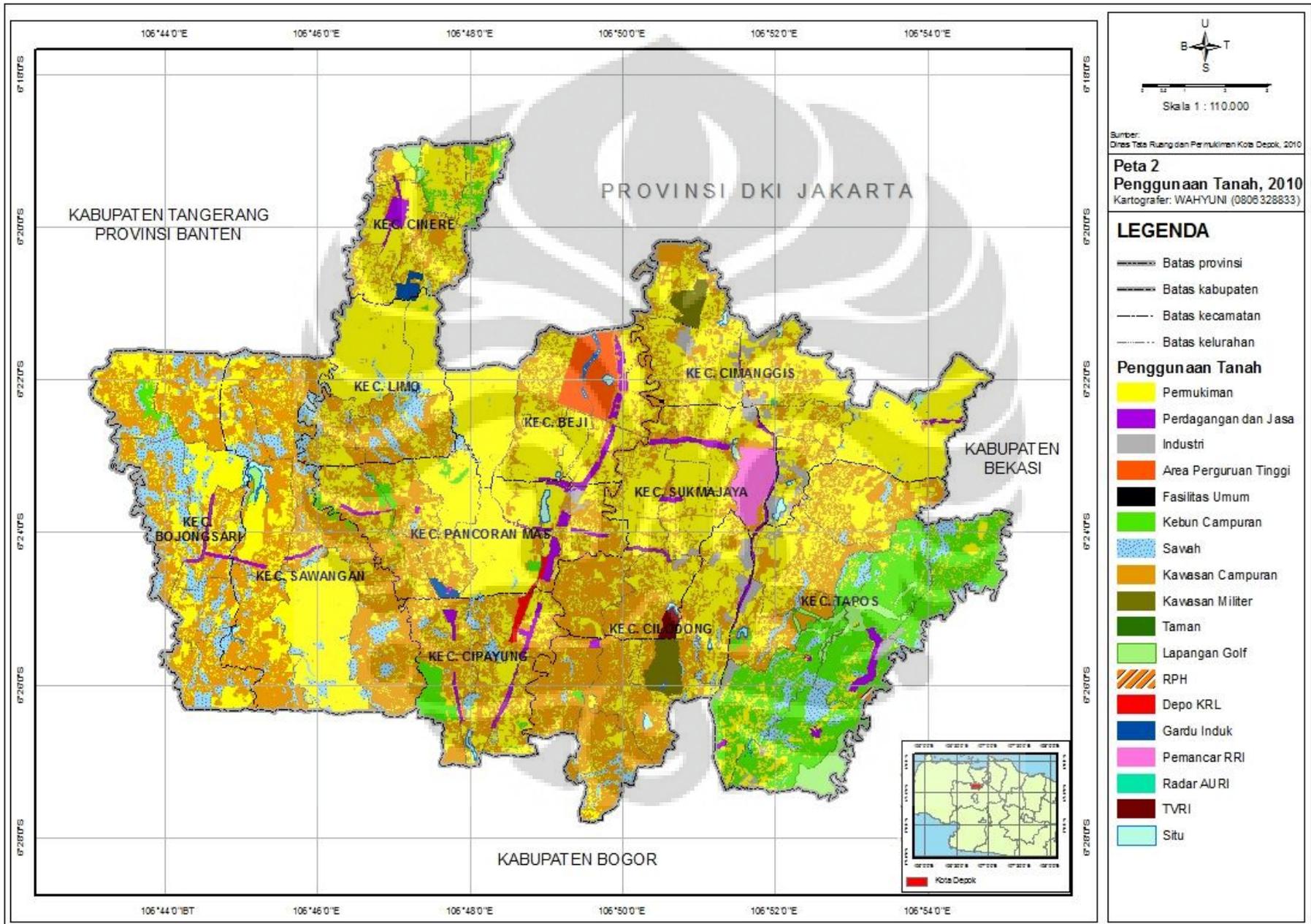


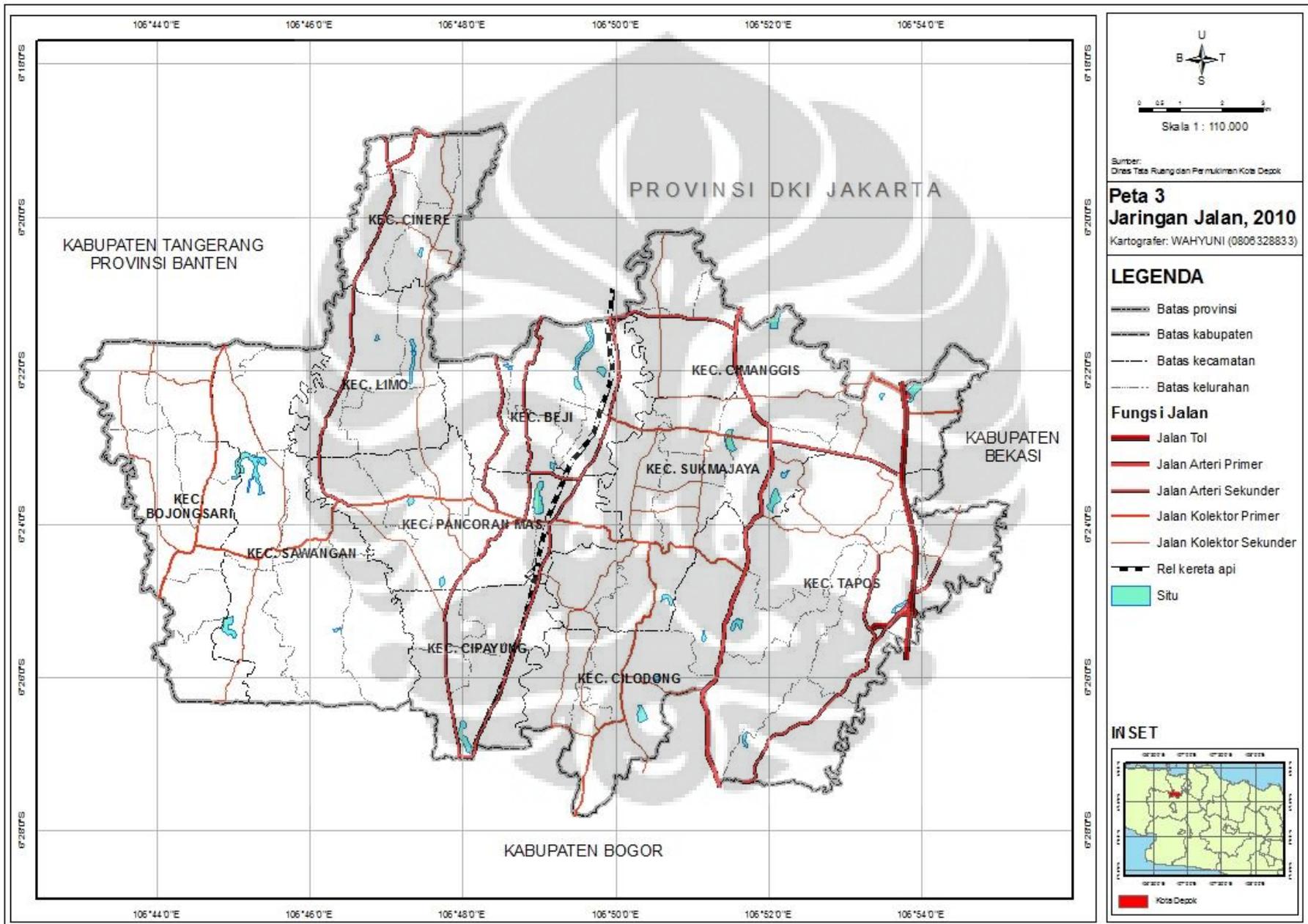
Di area permukiman (Abadijaya)

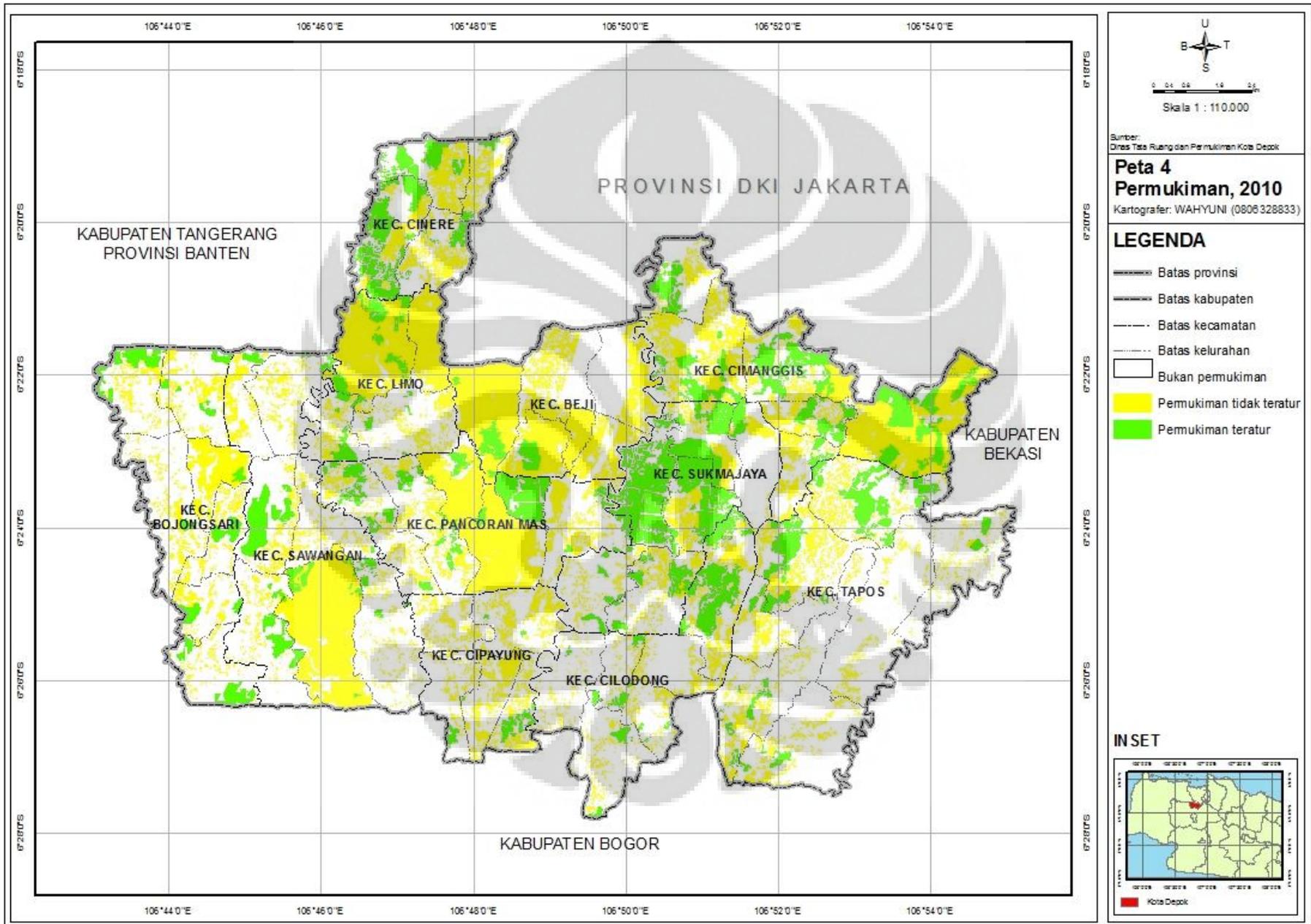


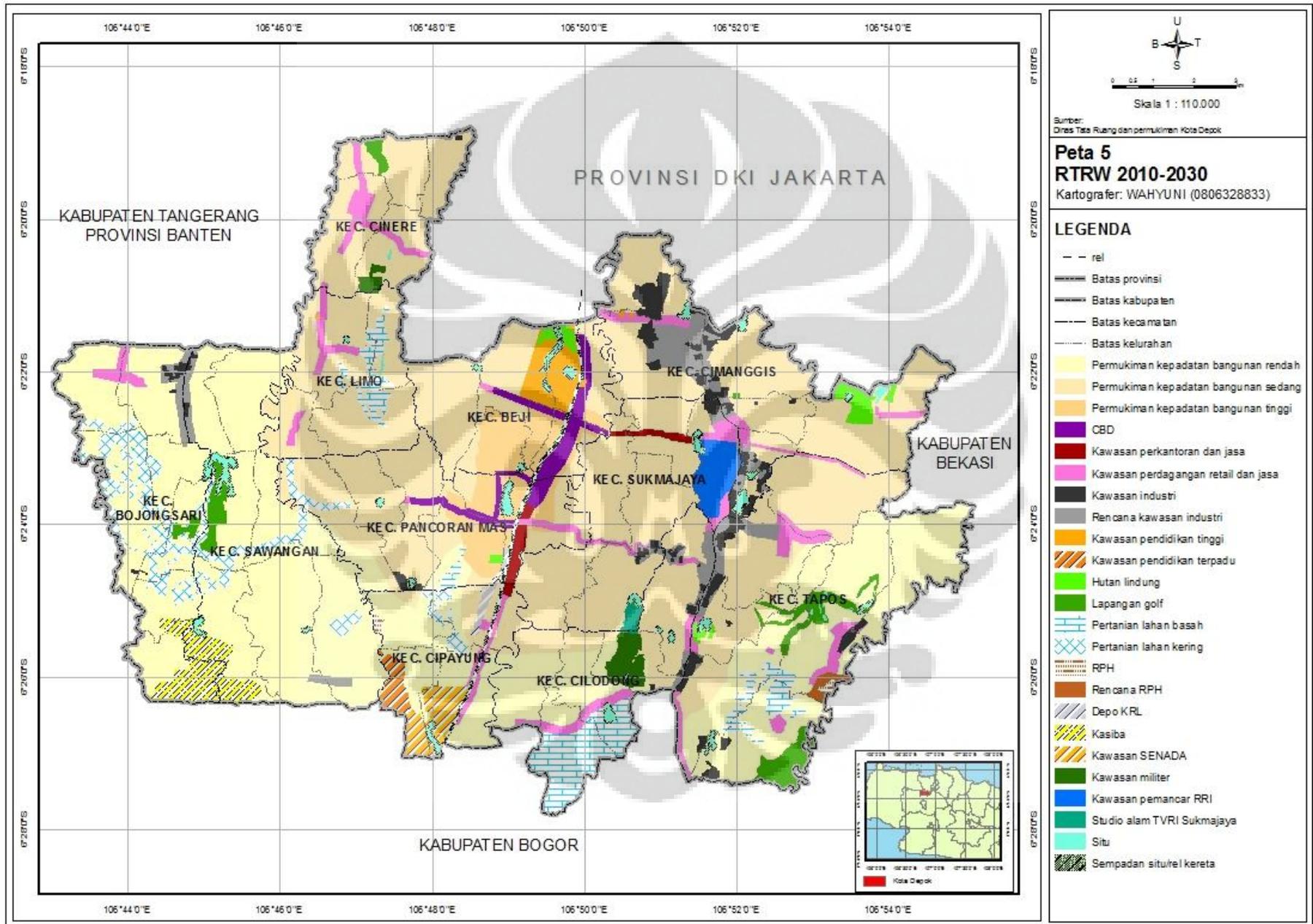
Pinggiri rel (Kemiri Muka)

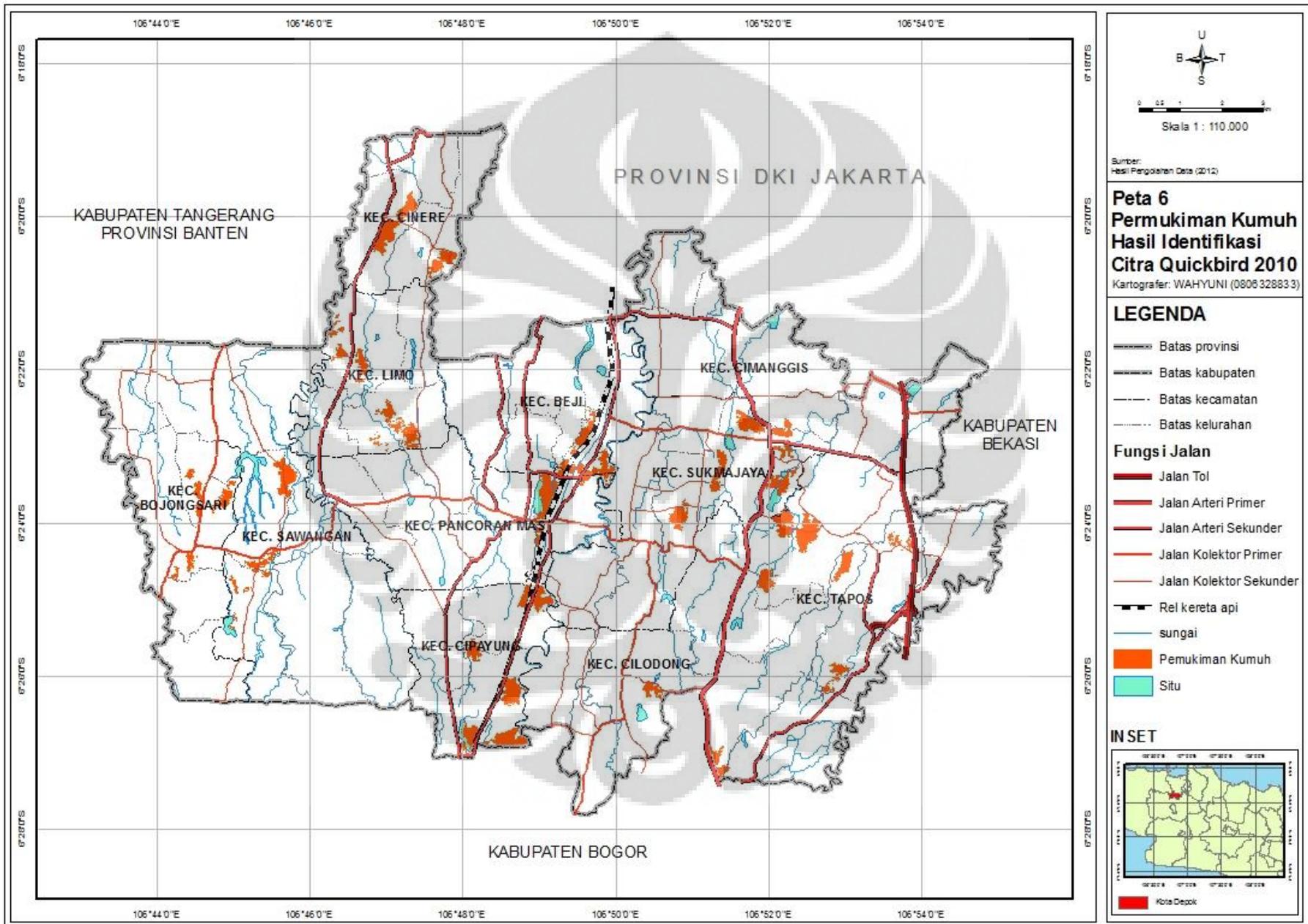




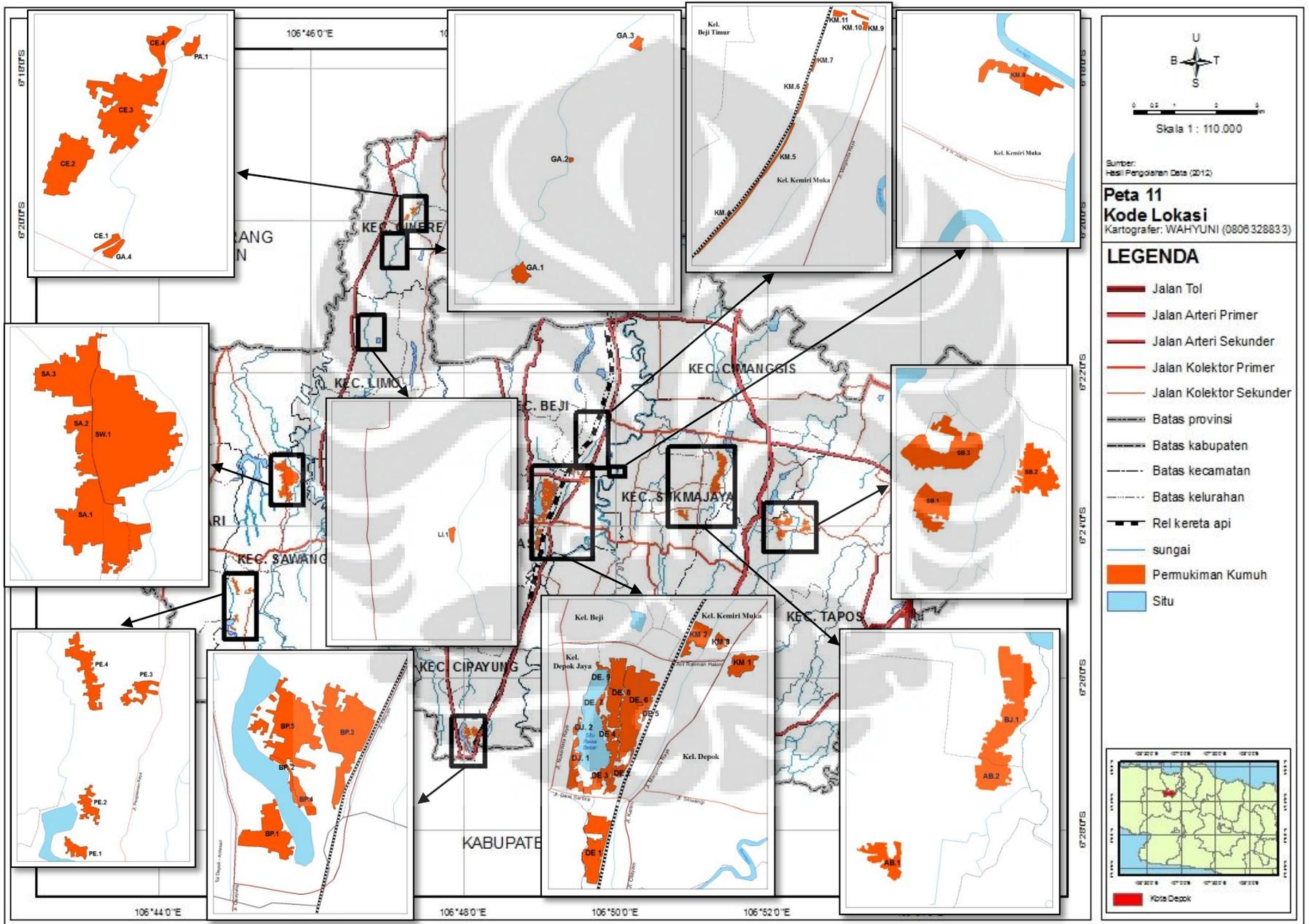












LAMPIRAN 3

Lampiran Tabel 1. Nilai Indikator Penilaian Tingkat Kekumuhan

No	Lokasi		Indikator								Total	Tingkat Kekumuhan
	Kelurahan	Kode	1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Abadijaya	AB.1	3	2	1	1	1	2	1	3	14	Ringan
2	Abadijaya	AB.2	2	2	2	1	1	2	1	3	14	Ringan
3	Baktijaya	BJ.1	3	2	2	2	2	1	1	3	16	Sedang
4	Bojong Pondok Terong	BP.1	3	2	1	1	2	2	2	3	16	Sedang
5	Bojong Pondok Terong	BP.2	3	2	2	3	3	2	2	3	20	Berat
6	Bojong Pondok Terong	BP.3	3	2	1	1	2	2	2	3	16	Sedang
7	Bojong Pondok Terong	BP.4	3	2	1	1	2	2	2	3	16	Sedang
8	Bojong Pondok Terong	BP.5	3	2	1	1	2	2	2	3	16	Sedang
9	Cinere	CE.1	3	3	3	2	3	3	3	3	23	Berat
10	Cinere	CE.2	2	1	1	1	1	2	1	3	12	Ringan
11	Cinere	CE.3	3	2	1	1	1	2	1	3	14	Sedang
12	Cinere	CE.4	3	3	3	3	3	3	2	3	23	Berat
13	Depok	DE.1	3	2	2	2	2	2	2	3	18	Sedang
14	Depok	DE.2	3	2	2	3	3	2	2	3	20	Berat
15	Depok	DE.3	3	2	2	2	3	2	2	3	19	Sedang
16	Depok	DE.4	3	2	2	3	2	3	2	3	20	Berat
17	Depok	DE.5	3	2	3	3	1	2	2	3	19	Berat
18	Depok	DE.6	3	2	3	3	1	2	2	3	19	Berat

Sambungan Lampiran Tabel 1

19	Depok	DE.7	3	2	1	2	3	2	2	3	18	Sedang
20	Depok	DE.8	3	2	1	2	1	2	2	3	16	Sedang
21	Depok	DE.9	3	3	3	3	2	3	3	3	23	Berat
22	Depok Jaya	DJ.1	3	2	2	3	3	2	2	3	20	Berat
23	Depok Jaya	DJ.2	3	2	2	3	3	2	2	3	20	Berat
24	Gandul	GA.1	3	3	3	3	3	3	2	3	23	Berat
25	Gandul	GA.2	3	3	3	3	3	3	3	3	24	Berat
26	Gandul	GA.3	3	3	3	3	3	3	3	3	24	Berat
27	Gandul	GA.4	3	3	3	3	3	3	3	3	24	Berat
28	Kemiri Muka	KM.1	3	2	1	1	1	2	1	3	14	Ringan
29	Kemiri Muka	KM.2	3	2	1	1	1	2	2	3	15	Sedang
30	Kemiri Muka	KM.3	3	2	1	1	1	2	1	3	14	Ringan
31	Kemiri Muka	KM.4	3	3	3	3	3	3	3	3	24	Berat
32	Kemiri Muka	KM.5	3	3	3	3	3	3	3	3	24	Berat
33	Kemiri Muka	KM.6	3	3	3	3	3	3	3	3	24	Berat
34	Kemiri Muka	KM.5	3	3	2	1	1	2	1	3	16	Sedang
35	Kemiri Muka	KM.8	3	3	2	2	3	2	3	3	21	Berat
36	Kemiri Muka	KM.9	3	3	3	3	3	3	3	3	24	Berat
37	Kemiri Muka	KM.10	3	3	3	3	3	3	3	3	24	Berat
38	Kemiri Muka	KM.11	3	3	3	3	3	3	3	3	24	Berat
39	Limo	LI.1	3	3	3	3	3	3	3	3	24	Berat
40	Pangkalanjati	PA. 1	3	3	3	3	3	3	2	3	23	Berat
41	Pengasinan	PE.1	1	3	1	1	2	2	1	3	14	Ringan

Sambungan Lampiran Tabel 1

42	Pengasinan	PE.2	1	3	1	1	2	2	1	3	14	Ringan
43	Pengasinan	PE.3	1	3	2	2	3	2	1	3	17	Sedang
44	Pengasinan	PE.4	1	3	2	3	2	1	2	3	17	Sedang
45	Sawangan	SA.1	2	2	1	1	2	2	1	3	14	Ringan
46	Sawangan	SA.2	2	2	1	1	2	2	1	3	14	Ringan
47	Sawangan	SA.3	2	2	1	1	2	2	1	3	14	Ringan
48	Sawangan Baru	SW.1	2	2	1	1	3	2	1	3	15	Sedang
49	Sukamaju Baru	SB.1	3	2	1	1	1	2	1	3	14	Sedang
50	Sukamaju Baru	SB.2	3	2	1	1	1	2	1	3	14	Sedang
51	Sukamaju Baru	SB.3	3	2	1	1	1	2	1	3	14	Sedang

Sumber: Hasil pengolahan data (2012)

Keterangan:

- a. 1 adalah jarak antar bangunan
- b. 2 adalah kondisi aksesibilitas
- c. 3 adalah jenis bangunan
- d. 4 adalah kondisi sanitasi
- e. 5 adalah persampahan
- f. 6 adalah penyediaan air bersih
- g. 7 adalah kondisi saluran limbah
- h. 8 adalah pekerjaan penduduk

Lampiran Tabel 2. Karakteristik Lokasi Permukiman Kumuh Kota Depok

No	Lokasi		Jarak Titik Terdekat dari (m)			Tipologi	Tingkat Kekumuhan
	Kelurahan	Kode	Badan Air	Rel Kereta Api	Pusat Ekonomi		
1	Abadijaya	AB.1	Jauh	Jauh	Sedang	Slum	Ringan
2	Abadijaya	AB.2	Jauh	Jauh	Dekat	Slum	Ringan
3	Baktijaya	BJ.1	Dekat	Jauh	Dekat	Slum	Sedang
4	Bojong Pondok Terong	BP.1	Dekat	Jauh	Sedang	Slum	Sedang
5	Bojong Pondok Terong	BP.2	Dekat	Jauh	Dekat	Slum	Berat
6	Bojong Pondok Terong	BP.3	Jauh	Dekat	Dekat	Slum	Sedang
7	Bojong Pondok Terong	BP.4	Dekat	Jauh	Dekat	Slum	Sedang
8	Bojong Pondok Terong	BP.5	Dekat	Jauh	Dekat	Slum	Sedang
9	Cinere	CE.1	Dekat	Jauh	Dekat	Slum	Berat
10	Cinere	CE.2	Jauh	Jauh	Dekat	Slum	Ringan
11	Cinere	CE.3	Dekat	Jauh	Dekat	Slum	Sedang
12	Cinere	CE.4	Dekat	Jauh	Dekat	Slum	Berat
13	Depok	DE.1	Dekat	Dekat	Dekat	Slum	Sedang
14	Depok	DE.2	Sedang	Sedang	Dekat	Slum	Berat
15	Depok	DE.3	Dekat	Jauh	Dekat	Slum	Sedang
16	Depok	DE.4	Dekat	Jauh	Dekat	Slum	Berat
17	Depok	DE.5	Dekat	Sedang	Dekat	Squatter	Berat
18	Depok	DE.6	Dekat	Sedang	Dekat	Slum	Berat
19	Depok	DE.7	Dekat	Jauh	Dekat	Slum	Sedang

Sambungan Lampiran Tabel 2

20	Depok	DE.8	Sedang	Sedang	Dekat	Slum	Sedang
21	Depok	DE.9	Dekat	Jauh	Dekat	Squatter	Berat
22	Depok Jaya	DJ.1	Dekat	Jauh	Dekat	Slum	Berat
23	Depok Jaya	DJ.2	Dekat	Jauh	Dekat	Squatter	Berat
24	Gandul	GA.1	Dekat	Jauh	Sedang	Slum	Berat
25	Gandul	GA.2	Dekat	Jauh	Sedang	Squatter	Berat
26	Gandul	GA.3	Dekat	Jauh	Sedang	Squatter	Berat
27	Gandul	GA.4	Dekat	Jauh	Dekat	Slum	Berat
28	Kemiri Muka	KM.1	Jauh	Jauh	Dekat	Slum	Ringan
29	Kemiri Muka	KM.2	Dekat	Sedang	Dekat	Slum	Sedang
30	Kemiri Muka	KM.3	Sedang	Jauh	Dekat	Slum	Ringan
31	Kemiri Muka	KM.4	Jauh	Dekat	Dekat	Squatter	Berat
32	Kemiri Muka	KM.5	Jauh	Dekat	Dekat	Squatter	Berat
33	Kemiri Muka	KM.6	Jauh	Dekat	Dekat	Squatter	Berat
34	Kemiri Muka	KM.7	Jauh	Dekat	Dekat	Squatter	Sedang
35	Kemiri Muka	KM.8	Dekat	Jauh	Dekat	Slum	Berat
36	Kemiri Muka	KM.9	Dekat	Jauh	Dekat	Slum	Berat
37	Kemiri Muka	KM.10	Dekat	Sedang	Dekat	Slum	Berat
38	Kemiri Muka	KM.11	Dekat	Dekat	Dekat	Slum	Berat
39	Limo	LI.1	Dekat	Jauh	Dekat	Squatter	Berat
40	Pangkalanjati	PA. 1	Dekat	Jauh	Dekat	Slum	Berat
41	Pengasinan	PE.1	Sedang	Jauh	Jauh	Slum	Ringan
42	Pengasinan	PE.2	Sedang	Jauh	Jauh	Slum	Ringan

Sambungan Lampiran Tabel 2

43	Pengasinan	PE.3	Jauh	Jauh	Dekat	Slum	Sedang
44	Pengasinan	PE.4	Jauh	Jauh	Dekat	Slum	Sedang
45	Sawangan	SA.1	Dekat	Jauh	Jauh	Slum	Ringan
46	Sawangan	SA.2	Jauh	Jauh	Jauh	Slum	Ringan
47	Sawangan	SA.3	Jauh	Jauh	Jauh	Slum	Ringan
48	Sawangan Baru	SW.1	Dekat	Jauh	Jauh	Slum	Sedang
49	Sukamaju Baru	SB.1	Jauh	Jauh	Dekat	Slum	Sedang
50	Sukamaju Baru	SB.2	Jauh	Jauh	Dekat	Slum	Sedang
51	Sukamaju Baru	SB.3	Dekat	Jauh	Dekat	Slum	Sedang

Sumber: Hasil pengolahan data (2012)